

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI

DAERAH PUJON BERBASIS AGRIBISNIS PERTANIAN

(Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

EKA NOVALIA PANJARWANTO

NIM 105030107111022



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Imam Hanafi, M.Si**
- 2. Drs. Minto Hadi, M.Si**

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah
Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian (Studi Pada Dinas Pertanian
Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Eka Novalia Panjarwanto

NIM : 105030107111022

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 11 Februari 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Imam Hanafi, M.Si

NIP 19691002 199802 1 001

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN

telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2016

Jam : 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Eka Novalia Panjarwanto

Judul : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah
Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian (Studi Pada Dinas Pertanian
Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

Ketua

MAJELIS PENGUJI

Anggota

Dr. Imam Hanafi, M.Si

NIP 19691002 199802 1 001

Penguji I

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP 19540127 198103 1 003

Penguji II

Drs. Mochamad Rozikin, MAP

NIP 19630503 198802 1 001

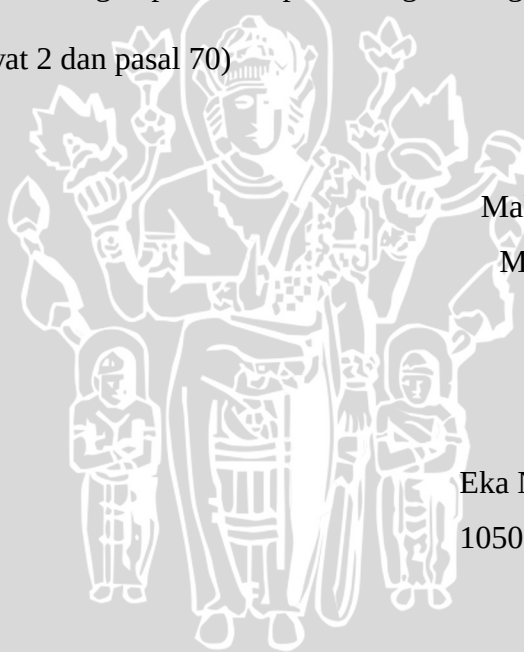
Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

NIP 19730713 200604 1 001

Pernyataan Orisinilitas Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, 9 Februari 2016

Mahasiswa

Eka Novalia Panjarwanto

105030107111022

RINGKASAN

Eka Novalia Panjarwanto, 2016, **Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang)**. Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Imam Hanafi, M.si ; Anggota Komisi Pembimbing: Dr. Minto Hadi, M.si

Pujon merupakan daerah yang kaya akan hasil pertanian. Daerah Pujon merupakan daerah kabupaten Malang Jawa Timur. Hasil pertanian tersebut berpotensi menjadi daerah sentra agribisnis pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Malang merupakan pihak pemerintah daerah yang berwenang menangani program dan strategi pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Malang dalam pencapaian tujuan mengembangkan potensi daerah pujon berbasis agribisnis pertanian, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan pengembangan potensi daerah Pujon tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, lokasi pada penelitian ini adalah kantor Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Metode analisis interaktif data meliputi tiga komponen yaitu kondensi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Malang melakukan pengembangan perbenihan/perbibitan, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk, pertanian serta pengembangan kawasan agribisnis, penguatan modal usaha kelompok, fasilitasi pengembangan hortikultura organik, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani, magang, sekolah lapang dan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana agribisnis, promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, pengadaan teknologi tepat guna dalam proses produksi agribisnis. Pelaksanaan strategi ini terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah sumber daya manusia, dukungan pemerintah pusat, tersedianya sumber daya potensial dan sumber daya alternatif bagi perkembangan agribisnis pertanian, pasar komoditas pertanian terbuka luas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi sarana dan prasarana kebun dinas/uptd masih terbatas, lemahnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan, lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan, investasi di bidang pertanian dan perkebunan masih rendah, lemahnya posisi tawar di tingkat petani serta rendahnya daya saing produk pertanian.

Dari hasil penelitian, ada saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain merencanakan program pembibitan secara serius dan terlokalisasi di daerah Pujon. Pembangunan sarana dan prasarana terutama sarana transportasi dan sarana perbankan untuk mendukung permodalan petani dan UMKM Pujon yang bergerak di bidang agribisnis.

Kata kunci: sektor pertanian, perekonomian lokal, agribisnis

SUMMARY

Eka Novalia Panjarwanto, 2016, **Local Government Strategy in the Development of Regional Potential Based Pujon Farms Agribusiness (Study in Malang District Agriculture Office)**. Chairman of the Advisory Committee: Dr. Imam Hanafi, M.si; Members of the Advisory Committee: Dr. Minto Hadi, M.si

Pujon an area that is rich in agricultural products. Pujon area is the district of Malang, East Java. The agricultural production has the potential to become a regional center for agribusiness. Malang District Agriculture Office is the local government administration in charge of programs and strategy development potential of the region Pujon agribusiness. The focus of this research is the strategy pursued Malang District Agriculture Office in achieving the goal of developing the potential of agri-based Pujon area of agriculture, as well as enabling and inhibiting factors in achieving the goals of the development potential of the region Pujon.

The research method used is descriptive research with qualitative research methods, the location of this research is the office of District Agriculture Office of Malang. Methods of interactive analysis of data includes three components, namely condensed, data presentation, and drawing conclusions or verifying.

The results of this study indicate that the District Agriculture Office Malang developing seedling / breeding, increased production, productivity and product quality, agriculture, and development of the area of agribusiness, strengthening the venture capital group, facilitating the development of horticulture organic, counseling and advisory services to farmers and agribusiness, increase system incentives and disincentives for farmers / farmer groups, internships, and field school training, education, agriculture and entrepreneurship agribusiness, construction and agribusiness facilities and infrastructure development, promotion of the production of agricultural / plantation in the regions, procurement of appropriate technology in the production process of agribusiness. Implementation of these strategies are enabling and inhibiting factors. Supporting factor is human resources, central government support, availability of resources and resource potential alternative for the development of agribusiness, agricultural commodity markets wide open. While inhibiting factor is the condition of facilities and infrastructure of garden office / UPTD still limited, the weak status and the small area of land ownership, the weak system of seed and seedling, investment in agriculture and plantations still low, weak bargaining power at the farm level and the low competitiveness of agricultural products .

From the research, there are suggestions that can be given by the other researchers plan a breeding program seriously and is localized in the area Pujon. Development of infrastructure especially transportation and banking facilities to support farmers and SMEs Pujon capital engaged in agribusiness.

Keywords: agriculture, local economies, agribusiness

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dengan kesabaran dan suri tauladan beliau dapat membawa seluruh umatnya kepada pendewasaan dalam berfikir.

Skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Agribisnis Produk Unggulan Pertanian di Kecamatan Pujon (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang)” ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun peneliti menyadari akan kemampuan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman, sehingga masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa menjadi mahasiswa dan menyelesaikan studi di Universitas Brawijaya Malang ini.

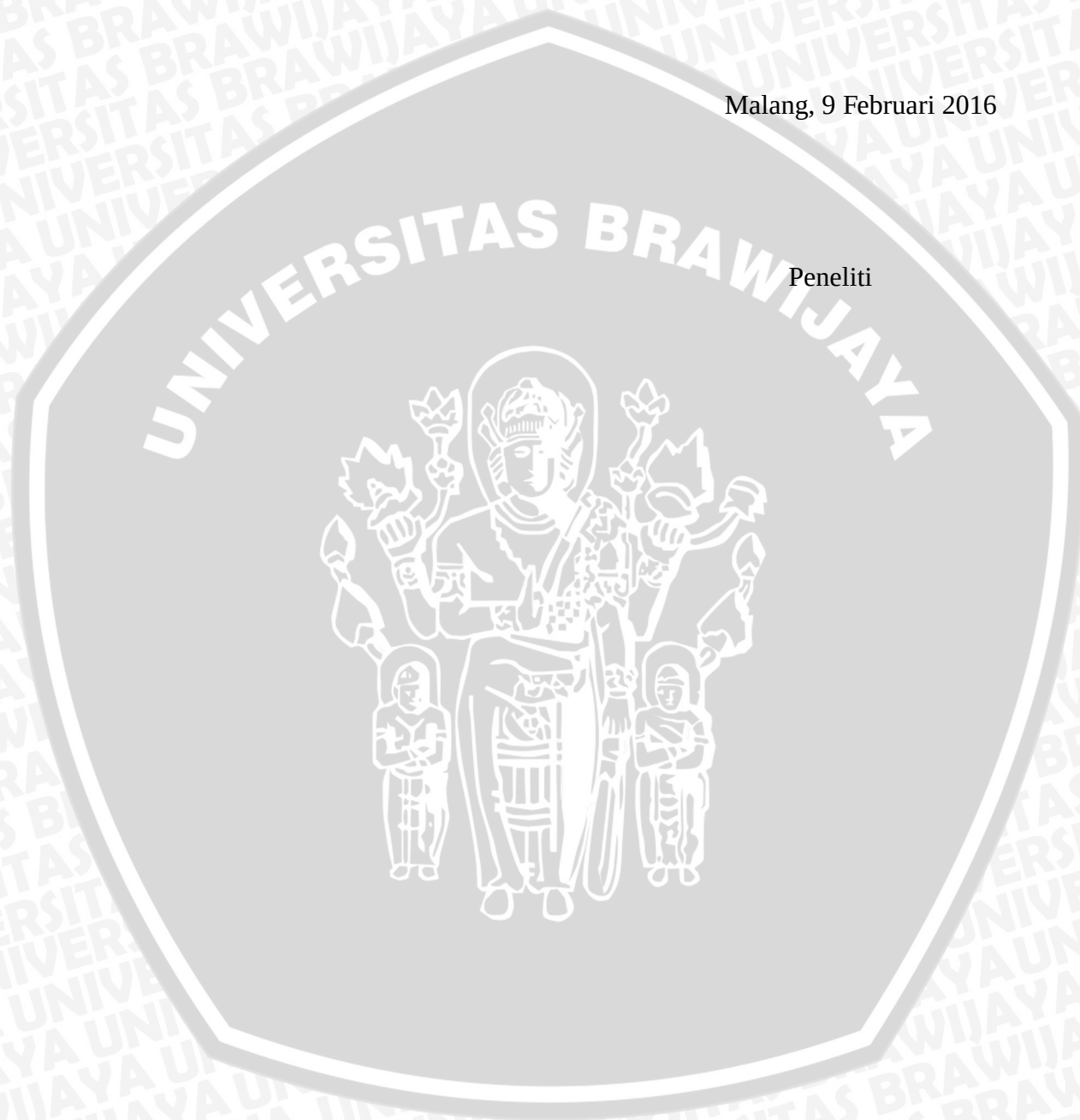
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat mengikuti kegiatan skripsi dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dr. Chaerul Saleh, M. Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang sudah banyak membantu peneliti selama memenuhi persyaratan-persyaratan birokrasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Imam Hanafi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Drs. Minto Hadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar pula telah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ir. Tomie Herawanto, MP, selaku Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Malang yang telah banyak membantu peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
7. Mama, Papa, Adik yang sudah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan baik moril maupun materiil, selama peneliti menyelesaikan studi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat waktu.
8. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti, selama peneliti menyelesaikan studi, sehingga peneliti mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berkualitas.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya, semoga semua amal baik yang telah beliau-beliau berikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 9 Februari 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
F. Alur Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kedudukan Pembangunan dalam Administrasi Publik	12
1. Administrasi Publik	12
2. Pengertian Pembangunan	14
3. Paradigma Pembangunan	15
C. Pembangunan Berbasis Potensi Lokal	19
1. LERD	19
2. Otonomi Daerah	20
3. Pemerintah Daerah	23
4. Peran Pemerintah Daerah	26
D. Kebijakan Publik	30

1. Pengertian Kebijakan Publik	30
1. Klasifikasi Kebijakan	32
2. Kriteria Penentuan Kebijakan	33
E. Konsep Agribisnis dan Agroindustri	34
1. Definisi dan Penjelasan Konsep Agribisnis dan Agroindustri	34
2. Manajemen Agribisnis	36
F. Strategi	37
1. Pengertian Strategi Menurut Ahli	37
2. Peranan Strategi	42
3. Klasifikasi Strategi	42
G. Produk Unggulan Daerah	44
1. Komoditas Unggulan	44
2. Produk Unggulan Daerah	46
3. Faktor-Faktor Vital Pada Produk Unggulan	49
H. UKM	53
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Fokus Penelitian	58
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	60
D. Sumber Dan Jenis Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrumen Penelitian	61
G. Metode Analisa Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	64
1. Dinas Pertanian Kabupaten Malang	64
2. Kecamatan Pujon	68
B. Analisis Data	74
1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian	74
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi daerah pujon berbasis agrobisnis pertanian	87

BAB V PENUTUP

	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA



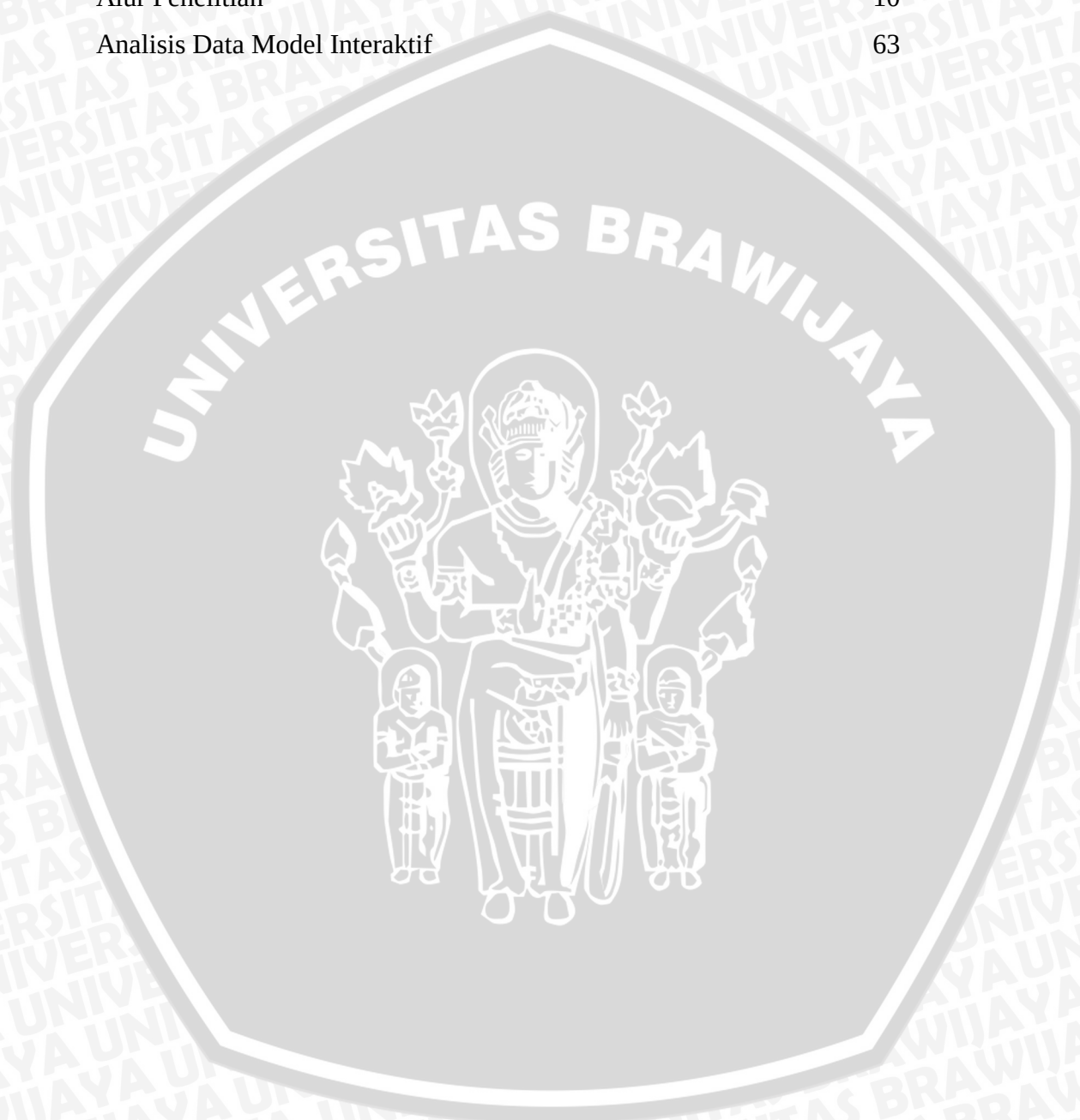
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Daftar Desa dan Dusun Kecamatan Pujon	70



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Alur Penelitian	10
2.	Analisis Data Model Interaktif	63



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Curriculum Vitae
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Ijin Riset dari BKP3 Kabupaten Malang
4. Peraturan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya pelaksanaan program pembangunan di daerah tidak bisa terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan. Kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakatnya dapat ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah dapat dipahami sebagai suatu kebijakan untuk hidup secara mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya daerah tanpa menggantungkan diri pada bantuan atau pembagian dari pusat. Dengan kata lain, seluruh daya dan kreativitas harus dikerahkan di daerah untuk kesejahteraan daerah.

Secara eksplisit berarti menjadi motivasi bagi seluruh lapisan masyarakat, dinas instansi di jajaran pemerintah daerah, wajib bergerak memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan institusinya untuk kesejahteraan daerah. Selama ini lembaga yang bergerak di bidang penyuluhan melalui para petugas pertanian lapangan lebih banyak berperan sebagai media penyampaian informasi, khususnya informasi teknologi budidaya dari sumber teknologi kepada penggunaanya yaitu para petani. Dengan tuntutan persaingan bisnis di masa mendatang dan tuntutan kualitas produksi yang lebih baik, peran penyuluh tidak cukup hanya menyampaikan informasi teknologi, tetapi juga dari aspek bisnisnya seperti informasi bisnis, peluang usaha, serta termasuk di dalamnya kewirausahaan.

Dengan demikian cara pandang terhadap petugas pertanian lapangan adalah sebagai konsultan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang menyangkut upaya untuk memajukan usahanya. Untuk itu institusi penyuluhan perlu merumuskan peran, cara pandang dan arah penyuluhan di masa mendatang dengan penekanan pada aspek agribisnis (Winarno, 1999).

Pembangunan pertanian (agribisnis) di Indonesia diarahkan ke struktur produksi komoditas yang lebih beragam melalui diversifikasi. Dengan program diversifikasi diharapkan pula bahwa ketergantungan masyarakat kepada konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok dapat berkurang. Salah satu alasan berkurangnya produksi beras di Indonesia disebabkan harga komoditi ini sering jatuh terutama saat panen, sehingga petani beralih ke produksi pertanian lainnya. Program ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan memberikan lapangan pekerjaan yang luas di perdesaan. Dalam sub sektor tanaman pangan peningkatan produksi tanaman palawija dan hortikultura sejalan dengan kerangka diversifikasi. Sejalan dengan program diversifikasi tersebut, pengembangan komoditas pangan lainnya di samping komoditas palawija adalah hortikultura yaitu tanaman buah-buahan dan sayuran. Komoditi sayuran dan buah-buahan adalah salah satu jenis tanaman pangan yang walaupun bukan makanan pokok tetapi kebutuhan Kabupaten Malang pada komoditas tersebut cukup tinggi, yaitu sekitar 35 kg/kapita/tahun. Dengan demikian, kebutuhan kota ini pada komoditas sayuran dan buah dengan jumlah penduduk sekitar 2.459.982 jiwa dalam satu tahun setara dengan 86.099.370 kg atau setara dengan 86.099,37 ton (Dinas Pertanian Kabupaten Malang, 2011). Sayuran dan buah, ada yang dikonsumsi dalam keadaan segar tetapi ada juga yang diolah lebih dahulu untuk dijadikan sebagai makanan pelengkap. Sebagai bahan pangan harganya yang tidak terlalu mahal dapat dijadikan sebagai penambah gizi.

Komoditi sayuran dan buah mengandung gizi yang tidak terlalu kecil seperti lemak dan protein. Menurut Price et al., (1980) dalam Adiyoga, dkk., (2000), pengembangan agribisnis sayuran dan buah menjadi sangat penting karena tingkat permintaan komoditi terutama di daerah perkotaan dipastikan akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan naiknya pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk maupun perkembangan pasar. Keberhasilan dalam mengembangkan komoditi ini hanya akan dapat dicapai jika perhatian manajemen tidak hanya terfokus pada produksi. Operasionalisasi konsep pemasaran merupakan hal yang mutlak diterapkan. Konsep pemasaran dalam hal ini adalah sekumpulan gagasan pengembangan produk yang mengacu pada pasar, berorientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen, serta didukung oleh usaha pemasaran secara terpadu yang diarahkan untuk membangkitkan kepuasan konsumen.

Kecamatan Pujon adalah salah satu kecamatan yang cukup potensial dalam pengembangan agribisnis di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan tersedianya lahan yang bisa dikatakan luas untuk bidang pertanian, struktur tanah dan udara di Kecamatan Pujon sangat cocok untuk pengembangan industri pertanian. Infrastruktur dan prasarana seperti itu akan merupakan nilai tambah yang sangat berarti dalam mengembangkan kegiatan bisnis maupun jasa dalam bidang pertanian, yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat. Luas wilayah Kecamatan Pujon 13.075,144 Ha. terdiri dari 10 Desa 36 Dusun 85 RW dan 306 RT dengan batas-batas wilayah :Sebelah Utara Kabupaten Mojokerto, Timur Kota Batu, Selatan Kecamatan Wonosari dan Kab. Blitar, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngantang. Yang lebih unik wilayah Kec. Pujon dikelilingi oleh gunung-gunung, antara lain : G. Banyak yang berbatasan dg. Kota Batu, G. Kawi, G.Cemoro Kandang, G.Parangklakah, G.Dworowati, G.Argowayang,

G.Gentong Growah, G.Biru, G.Anjasmoro. Luas Lahan Sawah di Kecamatan Pujon 902,20 Ha. Dan sebagian besar digunakan untuk bercocok tanam jagung, padi, sayur – sayuran, dan buah-buahan. Akan tetapi yang dominan adalah untuk menanam pohon buah apel.

Peluang pasar dalam pengembangan agribisnis komoditas buah apel di Kecamatan Pujon cukup realistis apabila diimbangi dengan penerapan inovasi-inovasi terhadap produksi pengolahan buah apel. Apalagi pada saat ini kebutuhan akan komoditi buah-buahan lokal di Indonesia sangat besar karena adanya kasus buah impor yang terinfeksi bakteri mematikan beberapa waktu yang lalu. Dengan tersedianya prasarana maupun sarana yang mendukung, menyebabkan potensi tersebut dengan sentuhan yang prima akan dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan daerah maupun masyarakat. Disamping infrastruktur sarana/prasarana, kelembagaan pendukung seperti Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi yang berkompeten, apabila bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Kecamatan Pujon akan sangat membantu dalam upaya pengembangan agribisnis komoditas buah apel di Kecamatan Pujon. Pengembangan agribisnis seyogianya didasarkan kepada potensi sumberdaya dengan memperhatikan aspirasi, kepentingan daerah serta mempertimbangkan faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan agribisnis tersebut, yaitu berupa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan. Di era sebelum otonomi daerah dimana proses pembangunan pada waktu itu serba sentralistik, proses perencanaan pengembangan agribisnis sangat didominasi oleh aspirasi pusat yang kadang-kadang mengabaikan potensi sumberdaya dan kepentingan daerah, sehingga program-program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berbagai faktor menjadi

ancaman dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan di Kecamatan Pujon seperti : masuknya produk buah impor, terjadinya alih fungsi lahan, serangan hama dan penyakit tanaman, ketersediaan dan harga pupuk, sifat mudah masak (perishable) dan fluktuasi harga. Faktor ini dapat menyebabkan rendahnya produksi/produktivitas maupun kualitas dan apabila ancaman tersebut tidak dapat dihindari jelas mengakibatkan inefisiensi. Dengan demikian produk yang dihasilkan akan sulit bersaing baik di pasar domestik apalagi di pasar global. Pembangunan pertanian kita sekarang ini masih tertinggal. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak mendorong meningkatnya produktivitas, rendahnya kualitas dan sumberdaya manusia pelaku pertanian, teknologi yang digunakan masih tradisional, sempitnya pemilikan lahan pertanian oleh keluarga tani, lemahnya kelembagaan petani dan kurangnya perlindungan harga komoditas pertanian dari pemerintah (Yudohusodo, 2001). Masalah tersebut juga menjadi isu dalam pengembangan agribisnis di Kecamatan Pujon. Hal lain yang menjadi masalah adalah keterbatasan dana dari pemerintah, sementara aspek permodalan merupakan aspek terlemah bagi petani, merupakan kendala yang tak pernah terselesaikan dengan tuntas sampai saat ini. Disamping itu peranan kelompok tani di Kecamatan Pujon belum efektif, padahal peran kelompok tani dalam pemupukan modal usaha tani sangat diharapkan, karena salah satu fungsi kelompok tani adalah memupuk permodalan, namun hingga sekarang kurangnya peran kelompok tani tetap menjadi permasalahan dalam pengembangan agribisnis khususnya komoditas buah apel. Dengan masalah-masalah tersebut di atas serta dengan adanya perubahan paradigma dalam proses pembangunan secara keseluruhan maka perlu adanya strategi yang tepat dalam upaya pengembangan agribisnis komoditas buah apel di Kecamatan Pujon, sehingga pembangunan agribisnis dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis memilih judul Skripsi : "

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang)".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian?
- b. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya terdapat manfaat yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Manfaat Akademis

1) Bagi Mahasiswa

- a) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

2) Bagi Perguruan Tinggi

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi produk unggulan daerah, mengembangkan agribisnis komoditas tersebut dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor industri pertanian.

2) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengembangan produk unggulan daerah melalui potensi industri pertanian

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini juga merupakan penjelasan dari ketertarikan peneliti terhadap judul skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur dan digunakan untuk memperkuat analisis yang ada di lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini dikemukakan jenis dan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisa data.

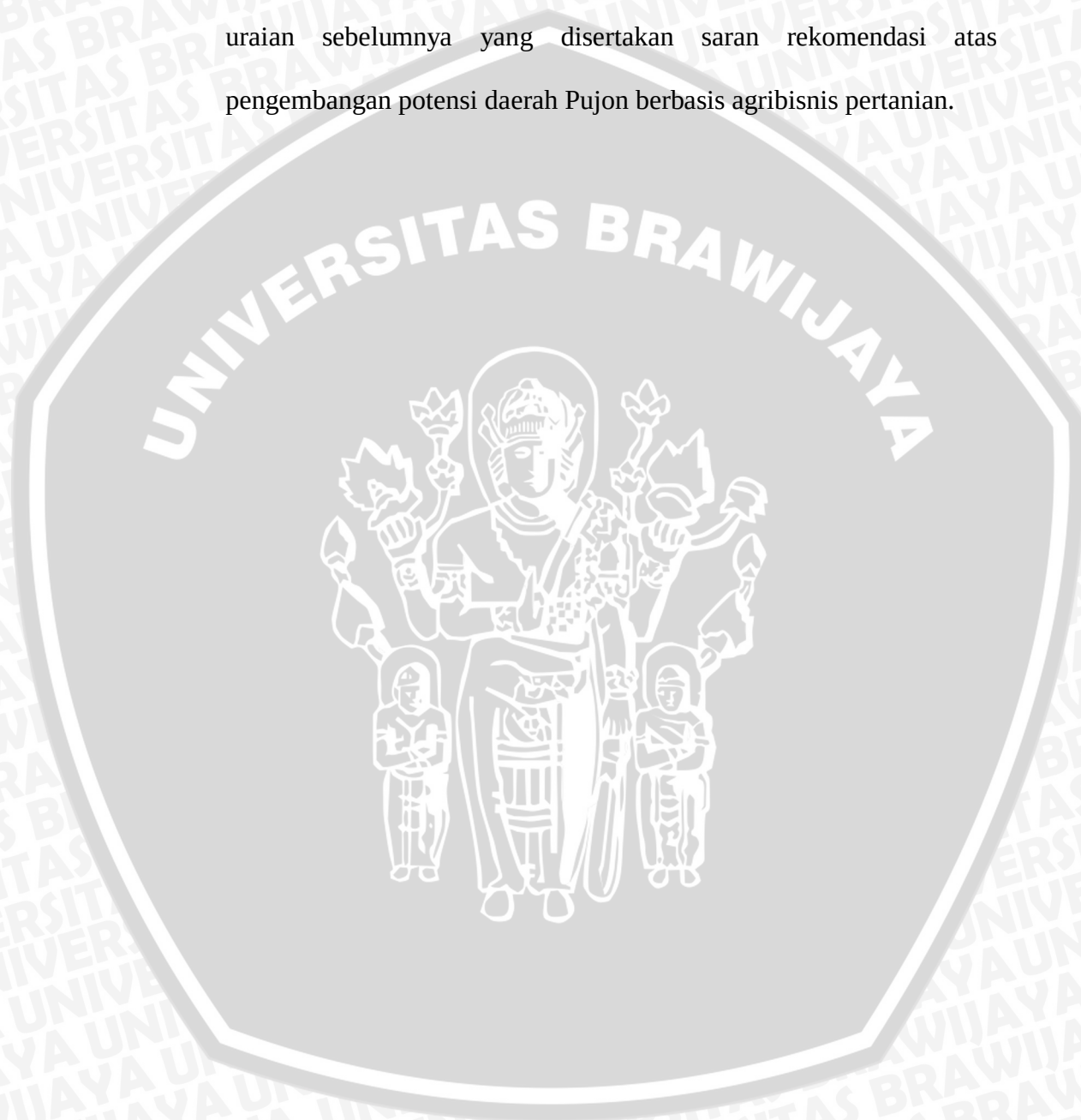
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang merupakan olahan bahan-bahan dan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Pembahasan merupakan analisis antara hasil penelitian dan teori yang relevan. Bab ini juga

merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

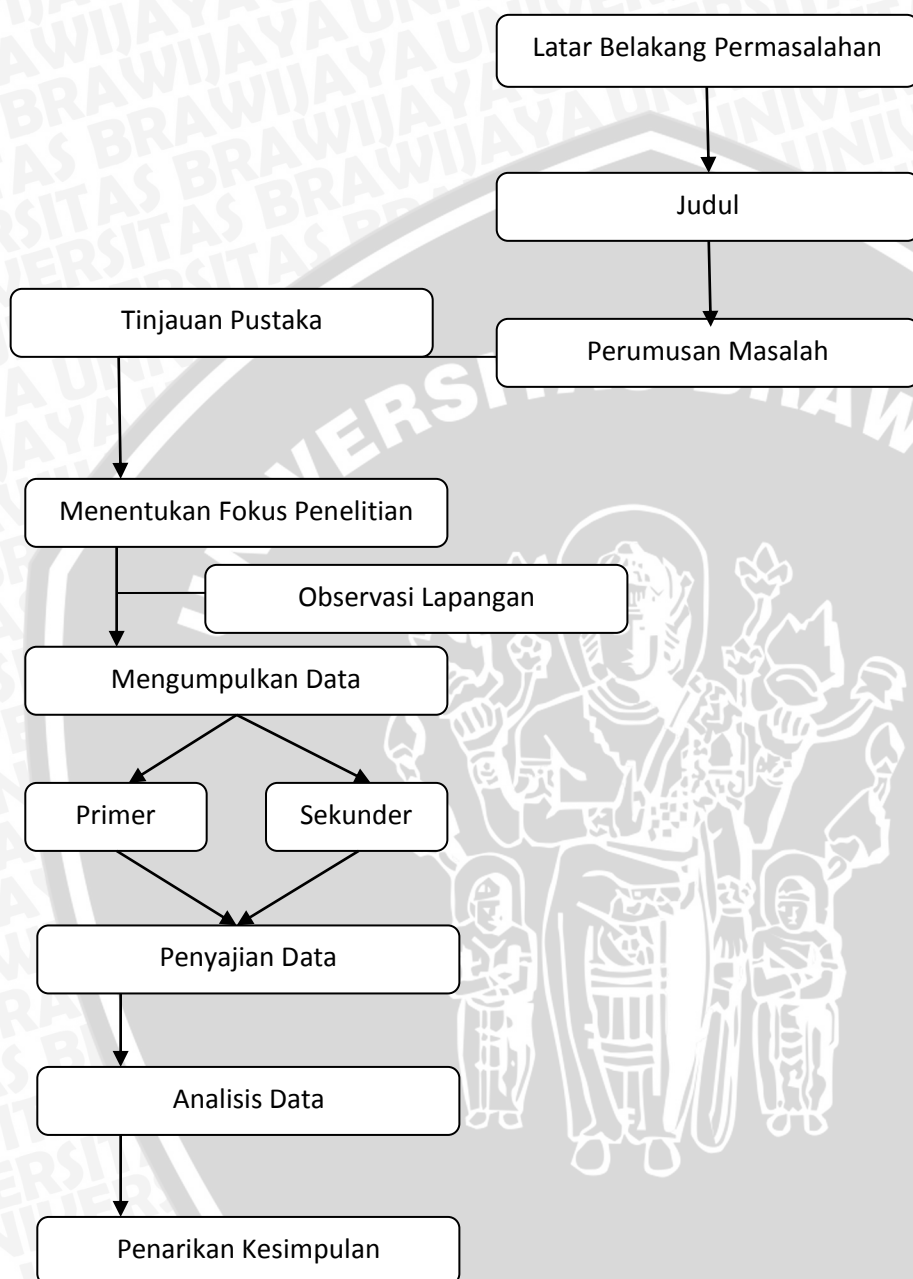
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya yang disertakan saran rekomendasi atas pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian.



F. ALUR PENELITIAN

Gambar 1 : Alur Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan adalah penelitian yang dilakukan BEEN KOGOYA. Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 21 Desember 2009. Strategi Pengembangan Agribisnis Buah Merah (*Pandanus conoideus* lam) di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Tujuan penelitian antara lain : (1) Mengidentifikasi potensi tanaman buah merah ditinjau dari pengembangan luas areal, produksi dan menghitung tingkat efisiensi usaha buah merah (2) mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan Agribisnis Buah merah di Kabupaten Tolikara, (3) Untuk strategi pengembangan Agribisnis buah merah dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi petani di Kabupaten Tolikara.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tolikara dengan metode pengumpulan data kewilayahan dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah analisis trend linear, analisis R/C ratio, analisis SWOT dan analisis deskriptif tanaman buah merah.

Hasil penelitian antara lain : (1) Perkembangan luas areal tanam, produksi buah merah dari tahun 2001 - 2007 di Kabupaten Tolikara mempunyai kecenderungan meningkat, serta Industri Rumah tangga merupakan kegiatan usaha yang efisien dan mampu meningkatkan nilai tambah, (2) Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan agribisnis buah merah di Kabupaten Tolikara antara lain (a) faktor Kekuatan : potensi kebun, Varietas unggul, merek produk, biaya produksi dan Harga

(b) faktor kelemahan : Promosi produk, Teknologi pengolahan , Rendahnya kualitas sumber daya manusia, modal dan informasi pasar .

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan agribisnis di Kabupaten Tolikara antara lain (a) Faktor peluang : Khasiat produk, Agroklimat , hubungan kemitraan , dukungan pemerintah dan loyalitas pelanggan, (b) faktor ancaman : daerah pemasaran, transportasi, Buah merah Instan dan pergeseran penggunaan lahan, (3) Strategi pengembangan merah dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi petani di Kabupaten Tolikara membutuhkan upaya peningkatan produksi dilakukan sumberdaya manusia yang trampil , kebijakan perkreditan, pengembangan manajemen agribisnis dan pengembangan sentra produksi dalam upaya pengembangan kelembagaan usaha dan transportasi antar daerah, pengembangan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan jaminan mutu produksi dan pengembangan kemitraan usaha perlu melakukan perbaikan.

B. Kedudukan Pembangunan dalam Administrasi Publik

1. Administrasi Publik

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yaitu “ad” dan ”ministrate” yang berarti ”to serve” yang dalam bahasa indonesia berarti melayani. Menurut siagian (2004) administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tjokroamidjojo (1995) menyatakan bahwa proses kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan tujuan negara/pemerintahan merupakan ruang lingkup wilayah ilmu administrasi publik.

Administrasi publik menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) dalam Sjamsuddin (2006) yaitu administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya. Administrasi publik harus berperan memberi dukungan terhadap penyelenggaraan negara, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan. Thoha (2010) juga menyatakan bahwa administrasi publik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, administrasi publik dapat membuat berbagai program kegiatan pembangunan dan melaksanakan berbagai usaha untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Jadi administrasi publik menekankan kepada peranan publik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai yang direncanakan.

Administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Administrasi publik bukan saja berhubungan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri, terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Hal ini berarti, administrasi publik memiliki peranan yang penting, karena menyangkut pengkoordinasian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam melaksanakan kebijakan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara, demi tercapainya kelancaran dalam proses pembangunan.

2. Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Menurut Riyadi dan Deddy dalam Bratakusumah (2005) secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Alexander (1994) pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui

kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, menurut Sukirno (1995) pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, Riyadi dan Deddy dalam Bratakusumah (2005) menjelaskan pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

3. Paradigma Pembangunan

Suryono (2004) mengemukakan pengertian paradigma sebagai cara pandang tentang suatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi, teori, metodologi, dan solusi tertentu. Strategi sebagai suatu seni memerlukan intuisi, sedangkan strategi sebagai suatu ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang terus menerus berkembang untuk menemukan cara-cara baru terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi.

Perkembangan suatu paradigma bergantung pada strategi yang dijalankan dalam suatu proses pembangunan. Paradigma pembangunan pada suatu waktu tertentu yang menjadi acuan pembangunan, dapat mengalami perubahan dan digantikan dengan paradigma baru yang bermunculan. Ada 7 paradigma pembangunan menurut Suryono (2006), meliputi:

- a. Strategi Pembangunan

Paradigma ini memfokuskan pada akumulasi kapital nasional dengan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan tingginya nilai GNP suatu negara. Dengan ditingkatkannya pendapatan perkapita diharapkan masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi dapat terpecahkan. Namun keberhasilan paradigma pertumbuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah membawa berbagai akibat negatif, terutama dampak sosial dan lingkungan hidup. Dalam paradigma ini menyebabkan terjadinya ketimpangan, dimana kemiskinan menjadi bertambah buruk.

b. Pertumbuhan Dengan Pemerataan

Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan kerja secara langsung kepada masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional. Pendekatan ini pada akhirnya gagal, karena penggunaan teknologi yang tinggi hanya mampu dikuasai oleh orang yang berpendidikan dan berketrampilan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan (Arndt dalam Suryono, 2006). Sementara yang tidak berpendidikan dan berketrampilan berada diluar jangkauan distribusi kesejahteraan nasional.

c. Teknologi Tepat Guna

Pendekatan ini diyakini sesuai untuk negara berkembang karena melalui teknologi tepat guna sumberdaya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan penduduk. Pendekatan ini pada akhirnya juga gagal, disebabkan keterbatasan pengembangan teknologi tepat guna.

d. Kebutuhan Dasar Pembangunan

Konsep dasar pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pangan, pakaian, dan papan saja, melainkan juga kemudahan pada berbagai akses, seperti pelayanan air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan ini kemudian menjadi tekanan dan unggulan dari pembangunan pedesaan, yang kemudian pada akhirnya ditelantarkan karena tak ada satupun yang dihasilkan.

e. Pembangunan Berkelanjutan

Ketersediaan sumberdaya alam yang memprihatinkan, menimbulkan kesadaran akan krisis lingkungan, akibat dari pembangunan yang berlebihan (*over development*). Perhatian kepada kelestarian hutan-hutan tropis mulai menjadi agenda penting dunia. Konsep pendekatan ini ialah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi yang akan datang (*World Commision* dalam Suryono, 2006). Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini seharusnya tidak diwariskan kepada generasi mendatang.

f. Konsep Pemberdayaan

Konsep ini muncul karena adanya dua hal yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedmann dalam Suryono, 2004). Konsep *empowerment* juga

sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang bertandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan lokalitas, sebab *civil society* akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal.

g. Pembangunan Berpusat Pada Manusia

Pergeseran paradigma terus menggiring proses pembangunan, akibat kegagalan dari paradigma sebelumnya. Perwujudan paradigma pembangunan manusiawi mulai muncul dengan mengutamakan manusia sebagai subjek pembangunan. Pendekatan pembangunan manusia (*human development*) ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan dan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) agar dapat menjadi aktor pembangunan, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Pembangunan Berbasis Potensi/Sumber Daya Lokal

1. *Local Economic Resources Development (LERD)*

Potensi atau sumber daya yang dimiliki daerah mampu menjadi kemampuan ekonomi yang ada di daerah dan dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara

berkesinambungan sehingga diperlukan suatu strategi pengembangan ekonomi lokal (Suparmoko, 2002). Pengembangan potensi lokal merupakan wujud pembangunan pada era otonomi daerah, yaitu pembangunan berskala daerah. Daerah berhak melakukan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Blakely (1994) dalam Supriyadi (2007) mendefinisikan *Local Economic Resources Development* (LERD) sebagai suatu proses pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumber daya alam yang dimiliki, untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktifitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Arsyad (2004), pembangunan ekonomi lokal merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Sumber daya lokal dapat menjadi sektor utama yang menjadi gantungan hidup masyarakat. Sehingga, pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan lingkungan sekitarnya. Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal (Munir, 2003).

Setiap upaya *Local Economic Resources Development* (LERD) tentu memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah (Alisjahbana, 2012). Keberhasilan pengembangan ekonomi

lokal menurut Blakely dalam Supriyadi (2007) dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil
- b. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
- c. Pemberdayaan lembaga mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran
- d. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Pengembangan ekonomi lokal sebaiknya mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat harus mampu mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki. Penggunaan sumber daya tersebut merupakan inisiatif yang berasal dari pemerintah daerah, dengan fokus wilayah sebagai satu kesatuan sasaran pembangunan ekonomi, dan manfaat hasilnya untuk lokal.

2. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan “pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri” (Sasana, 2006). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah: “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa: “otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan,

dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah”. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002) bahwa: “otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal”. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Remy Pnid'homme dalam (Sugiyanto, 2000) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

- a. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
- b. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
- c. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya public hearing.
- d. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.
- e. Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :
 - f. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah
 - g. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata,
 - h. dan bertanggung jawab.

- i. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- j. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
- k. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- l. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- m. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi dalam (Frediyanto, 2010) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

a. Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

3. Pemerintah Daerah

Sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah yang ada di wilayah Negara Indonesia. Diatur pula dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

pemerintahan di negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibagi dalam 2 bentuk, yaitu :

- a. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ada tiga asas pemerintahan di daerah yaitu :

a. Asas Desentralisasi

Asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Asas Dekontrasi

Asas pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal dan wilayah tertentu.

c. Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa dimana pemerintahan daerah mempunyai wewenang dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi

4. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban kewajibannya.

Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan

rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat.

Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
- c. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk

melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggara negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi
- i. Asas efektivitas

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- c. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.
- d. Melestarikan sosial budaya.
- e. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- f. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang telah diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintahan yang di luar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

D. Kebijakan Publik

kebijakan publik merupakan salah satu faktor terpenting pelaksanaan administrasi publik. Kebijakan publik dalam Islamy (2009:20) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi paa tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Carl Friedrich dalam Wahab (2012:9) menjelaskan bahwa kebijaksanaan ialah tindakanyang mengarah pada tujuan ang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Demikian pula menurut Wilson dalam Wahab (2012:13) kebijakan publik adalah sebagai berikut:

“The action, objectives and pronouncement of governments on perticular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them and the explanations they give for what happens (or does not happens)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Sedangkan menurut pakar Inggris, W.I Jenkins (Wahab,2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“A set pf interrelated decisions taken by a political actoror group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the

power of these actors to achieves” (rangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Dari definisi-definisi tersebut kita dapat membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara atau administrasi publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan. Ketiga, dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna lainnya.

2. Klasifikasi Kebijakan

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

3. Kriteria Penentuan Kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

- a. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
- b. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
- c. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
- e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
- f. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
- g. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai

tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

E. Konsep Agribisnis dan Agroindustri

1. Definisi dan Penjelasan Konsep Agribisnis dan Agroindustri

Agribisnis merupakan suatu kegiatan yang utuh dan tidak dapat terpisah antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian (Soekartawi, 2001).

Agribisnis adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait erat, yaitu subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi (subsistem agribisnis hulu), subsistem usahatani atau pertanian primer, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, serta subsistem jasa dan penunjang (Badan Agribisnis, 1995). Dalam arti luas agribisnis adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agrootomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit.

Subsistem usahatani (on-farm agribusiness) yang merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan 10 produk pertanian primer. Termasuk ke dalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan. Subsistem agribisnis hilir (down-stream

agribusiness) yang berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya. Disamping ketiga subsistem di atas, diperlukan subsistem keempat sebagai bagian dari pembangunan sistem agribisnis. Subsistem penunjang adalah seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga-keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah.

Agroindustri merupakan suatu kegiatan atau usaha yang mengolah bahan baku yang berasal dari tanaman dan atau hewan melalui proses tranformasi dengan menggunakan perlakuan fisik dan kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi.

Ciri penting dari agroindustri adalah kegiatannya tidak tergantung musim, membutuhkan manajemen usaha yang modern, pencapaian skala usaha yang optimal dan efisien, serta mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Hasyim dan Zakaria, 1995). Hal ini berarti agroindustri merupakan mesin pertumbuhan dalam sistem agribisnis yang pada akhirnya akan menyumbang secara positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Agroindustri merupakan suatu usaha yang mengolah bahan-bahan yang berasal dari tanaman dan hewan. Pengolahannya mencakup transformasi dan preservasi melalui perubahan secara fisik dan kimiawi, penyimpanan,

pengemasan dan distribusi. Karakteristik pengolahan dan derajat transformasi dapat sangat beragam, mulai dari pembersihan, grading dan pengemasan, pemasakan, pencampuran dan perubahan kimiawi yang menciptakan makanan sayur-sayuran yang berserat (Austin, 1992).

2. Manajemen Agribisnis

Dalam buku Manajemen Agribisnis (Rianto Joko, 2012) dijelaskan bahwa pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu selalu berupaya agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, seseorang yang hendak terjun di bidang agribisnis harus memahami konsep-konsep manajemen dalam agribisnis.

Beberapa hal yang membedakan manajemen agribisnis dengan manajemen lainnya adalah :

- a. keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis yaitu dari para produsen dasar sampai ke konsumen akhir akan melibatkan hampir setiap jenis perusahaan bisnis yang pernah dikenal oleh peradaban
- b. besarnya jumlah pelaku agribisnis
- c. hampir semua agribisnis terkait erat dengan pengusaha tani baik langsung maupun tidak langsung.

F. Strategi

1. Pengertian Strategi Menurut Ahli

Strategi secara umum adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan (victory) pencapaian tujuan (to achieve goals). Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi, Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi, Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi, Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut, Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut.

Menurut Carl Von Clausewits (Carl Philipp Gottfried) (1780-1831) (Husein, 2001) seorang ahli strategi dan peperangan, Pengertian strategi adalah

penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan "*the use of engagements for the object of war*". Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang (*War is a mere continuation of politics by other means / Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln*).

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif. Istilah strategi berasal dari kata Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan.

Menurut Henry Mintzberg (Husein, 2001), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), strategi sebagai taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.

- a. Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (a directed course of action) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita cita yang telah ditentukan; sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.
- b. Pengertian strategi sebagai pola (pattern) adalah sebuah pola perilaku masa lalu yang konsisten, dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran daripada menggunakan yang terencana ataupun diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksud maka strategi sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (emergent).

- c. Definisi strategi sebagai posisi adalah menentukan merek, produk ataupun perusahaan dalam pasar, berdasarkan kerangka konseptual para konsumen ataupun para penentu kebijakan; sebuah strategi utamanya ditentukan oleh faktor faktor eksternal.
- d. Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh lawan (competitor)
- e. Pengertian strategi sebagai perspektif adalah mengeksekusi strategi berdasarkan teori yang ada ataupun menggunakan insting alami dari isi kepala atau cara berpikir ataupun ideologis.
- f. Menurut Craig & Grant (Husein, 2001) pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and long-term goals) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives).
- g. Menurut Siagian (2004) menyatakan bahwa pengertian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut
- h. Menurut Johnson and Scholes (Husein, 2001), bahwa pengertian strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang: yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat

dilaksanakan, Hatten dan Hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut :

- a. Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.
- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.

- f. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- g. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi

menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

2. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan
- c. Strategi sebagai target Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

3. Klasifikasi Strategi

Seperti yang dipaparkan oleh Husein (2002:31) bahwa strategi perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan dan tingkatan tugas. Dilihat

dari jenis perusahaan, ada strategi perusahaan konglomerasi yang memiliki beberapa Strategic Bussiness Unit (SBU), dan strategi perusahaan kecil dan hanya memiliki satu SBU. Sedangkan dilihat dari tingkatan tugas, strategi dapat diklasifikasikan menjadi : strategi generik (generic strategy), strategi utama/induk (grand strategy), dan strategi fungsional.

a. Strategi generik

Menurut Porter (2002:32) strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Dalam praktek, setelah perusahaan mengetahui strategi generiknya, untuk implementasinya akan ditindaklanjuti dengan langkah penemuan strategi yang lebih operasional. Kemudian Wheelen dan Hunger (2002:33) membagi strategi generik ini menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Strategi stabilitas (stability). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini risikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan (mature).
- 2) Strategi Ekspansi (Expansion). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau perluasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaannya, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi, selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung resiko, kegagalan yang tidak kecil.
- 3) Strategi Penciutan (Retrenchment). Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang

dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang cashflow negative. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun (decline).

b. Strategi Utama

Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi generik.

c. Strategi Fungsional

Strategi fungsional merupakan turunan strategi utama dan lebih bersifat spesifik serta terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu, seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan lain sebagainya.

G. Produk Unggulan Daerah

1. Komoditas Unggulan

Pada dasarnya, keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan agrobisnis. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi salah urus bahkan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan komoditas unggulan dimaksud. Berikut adalah pengelompokan komoditas unggulan, sebagai rujukan untuk menempatkan posisi produk agro dari sisi teori keunggulan komoditas, antara lain :

- a. Komoditas unggulan komparatif : komoditas yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, di mana daerah lain tak mampu

memproduksi produk sejenis. Atau pula, komoditas hasil olahan yang memiliki dukungan bahan baku yang tersedia pada lokasi usaha tersebut.

- b. Komoditas unggulan kompetitif : komoditas yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.
- c. Komoditas unggulan spesifik : komoditas yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter spesifiknya.
- d. Komoditas unggulan strategis : komoditas yang unggul karena memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, komoditas unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika memandang komoditas unggulan dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positif, jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, mengingat ukuran keberhasilan komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelompokan komoditas tersebut, dapat disusun sebagai berikut :

- a. Komoditas unggulan pasar ekspor : komoditas yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard, dan jumlah yang memadai, sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.

- b. Komoditas unggulan pasar tradisional : komoditas yang mampu memenuhi keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga, dan budaya lokal.
- c. Komoditas unggulan pasar modern : komoditas yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.
- d. Komoditas unggulan pasar industri : komoditas yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur agro.
- e. Komoditas unggulan pasar antar pulau : komoditas yang dibutuhkan oleh pasar antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.
- f. Komoditas unggulan pasar khusus : komoditas yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap dengan spesifikasinya. (Yuhana, 2008).

2. **Produk Unggulan Daerah**

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah (daerah) mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan menginventarisasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah tiap-tiap sub sektor serta tingkat Kabupaten.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga

mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor. (Anonim, 2000).

Sementara menurut Cahyana Ahmadjayadi (2001), Produk Unggulan Daerah (PUD) adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan daerah juga berorientasi ramah lingkungan dan berorientasi padapasar baik lokal maupun nasional dan regional. Pengembangan produk unggulan dan pemberdayaan sebagai potensi ekonomi daerah pada era otonomi adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan, hal tersebut disebabkan karena pengembangan PUD terkait erat dengan kemauan politik atau kebijakan dari Pemerintah Daerah. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dan sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan produk unggulan daerah sebagai salah satu tonggak dari pada ekonomi daerah. Oleh karena, produk unggulan daerah terkait beberapa stakeholders yang saling berperan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Stakeholders dimaksud adalah pemilik bahan baku dan pengolah/penghasil bahan baku, pengguna atau konsumen, fasilitator atau pemerintah dan lembaga sosial masyarakat. Stakeholders tersebut saling terkait dan menunjang satu sama lain sehingga peranan koordinasi dalam pencapaian tujuan menjadi unsur utama dalam pengembangan PUD. Koordinasi ini menjadi instrumen penting dalam pengembangan produk unggulan daerah. (Cahyana Ahmadjayadi, 2001).

Produk unggulan merupakan suatu strategi pembangunan yang tidak mudah didikte oleh daerah/negara lain. Produk unggulan daerah tidaklah harus berupa hasil industri yang berteknologi canggih atau dengan investasi tinggi tetapi produk

unggulan bisa dengan produk lokal yang disebut dengan One Area Five Products (satu daerah bisa dengan lima produk unggulan) Hal tersebut sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah pada tahun 1998 dan 1999. Inti daripada surat tersebut adalah bahwa kabupaten/kotadapat menghasilkan 5 (lima) PUD yang disahkan oleh kepala daerah. (Cahyana Ahmadjayadi, 2001).

Menurut Yufriзал (www.sarantausurambi.com) produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global (Kementerian Koperasi &UKM).

Sedangkan Prof.Dr.Ir.Soemarno,MS dalam bahan kajian strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis memaparkan Produk Unggulan atau Komoditi unggulan itu merupakan hasil usaha masyarakat pedesaan dengan kriteria :

- a. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan /ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah);
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dapat dikembangkan;
- c. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat perdesaan;
- d. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia;
- e. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Banyak penelitian dan kajian tentunya berkaitan dengan produk unggulan atau sektor unggulan daerah, baik pendekatan menggunakan analisis Location Quotients (LQ) maupun analisis lain. Tetapi titik beratnya sekarang bukanlah

menemukan apa produk unggulan yang ditemukan di daerah, tetapi lebih mengarah kepada tingkat keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya.

Produk unggulan apapun yang ada tentunya diperlukan pengelolaan dan pengembangan serta pemasaran yang sinergis. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Faktor-Faktor Vital Pada Produk Unggulan

a. Pendapatan

Tujuan pokok perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau pendapatan maksimal, disamping ada tujuan-tujuan lain yaitu pertumbuhan skala usaha dalam jangka panjang, kepentingan sosial dan sebagainya (Sudarsono; 1983). Dengan demikian untuk melihat keberhasilan dari suatu usaha dapat dilihat dengan tercapai tidaknya tujuan dari perusahaan. Demikian pula dengan keberhasilan pengusaha produk unggulan dapat diukur dengan melihat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pendapatan atau keuntungan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh pengusaha, setelah dikurangi oleh ongkos tersembunyi (Sadono Sukirno, 1982: 38).

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan dari kegiatan usaha seseorang sebagai imbalan atas kegiatan yang dilakukan. Pengusaha sebagai pimpinan usaha dapat mengambil keputusan-keputusan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, di samping itu pengusaha dapat memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan perusahaan dalam menciptakan keuntungan diperoleh dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh.

Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, dan sewa tanah. Hasil penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya tersebut diperoleh keuntungan. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan.

b. Modal Kerja

Pada fase Merkantilis, pengertian modal dihubungkan dengan pengertian uang, sebagai realisasi dari pandangan Merkantilis tersebut, maka Adam Smith dan David Hume atau yang dinamakan fase klasik, muncul pengertian modal dipandang dari sudut barang. Jenis modal ditinjau dari segi sumbernya meliputi: (Bambang Riyanto, 1994: 171-181)

- 1) Modal asing adalah modal yang berasal dari luar, sifatnya sementara sehingga modal tersebut merupakan hutang dimana pada saatnya harus dibayar kembali.
- 2) Modal sendiri adalah usaha yang berasal dari pemilik dan yang tertanam di dalam usaha tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat dominan dalam kegiatan produksi, karena tenaga kerja itulah yang berperan mengalokasikan dan memanfaatkan faktor-faktor produksi lain guna menghasilkan suatu output yang bermanfaat. Sedangkan pengertian tenaga kerja itu sebagai berikut:

- 1) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa

atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU Ketenagakerjaan No. 14 1969).

- 2) Tenaga kerja (Man Power) adalah sejumlah penduduk yang dapat menghasilkan barang atau jasa, jika ada permintaan tenaga kerja mereka akan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja sering pula disebut penduduk usia kerja dalam arti sudah bekerja, sedang mencari kerja dan sedang melakukan kegiatan lain yang belum tercakup mencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun sedang tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut berpartisipasi dalam bekerja (Sutomo, 1990:3).
- 3) Tenaga kerja berdasarkan definisi PBB adalah penduduk usia 15-64 tahun. Sementara penduduk Indonesia usia 10 tahun telah ada yang mulai bekerja atau membantu mendapatkan penghasilan, dan penduduk umur tua (65 keatas) juga ada yang masih bekerja, oleh karena itu definisi tenaga kerja yang tampak lebih sesuai untuk Indonesia adalah penduduk kelompok usia 10 tahun ke atas. Dalam definisi tenaga kerja Indonesia tercakup penduduk kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun keatas (Aris Ananta dkk, 1998: 21).

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang penting dan harus diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan cuma dilihat dari segi jumlah tenaga kerjanya tetapi juga dari segi kualitas dan macam tenaga kerja yang memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada

tingkat tertentu, sehingga jumlahnya optimal (Soekartawi, 1994: 7). Tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah tenaga kerja yang digunakan (Sukirno, 1994 : 195). Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus-menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan mengalami pertambahan, tetapi setelah mencapai tingkat produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai titik negatif dan ini berakibat pertambahan produksi semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun (Sukirno, 1994 : 195). Dengan perbedaan tingkat produksi maka akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh pengusaha.

d. Bahan Baku

Bahan baku atau bahan mentah merupakan faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi (Gunawan Adi Saputrodan Mawan asri, 1989: 225). Menurut prinsip akuntansi, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap olah, merupakan harga pokok bahan baku atau nilai bahan baku. Harga pokok bahan baku meliputi harga beli yang tercantum dalam faktur penjualan, biaya angkutan, biaya-biaya pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah (Mulyadi, 1990: 163).

Namun pada kenyataannya harga pokok bahan baku hanya dicatat sebesar harga beli menurut faktur dari pemasok. Hal ini dilakukan karena pembagian biaya pada masing-masing jenis bahan baku dalam faktur seringkali memerlukan biaya akuntansi yang lebih besar bila dibanding dengan manfaat ketelitian perhitungan harga pokok yang diperoleh

(Mulyadi, 1990: 133). Dalam teori, yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan dalam produksi adalah banyaknya output yang harus di produksi, serta bagaimana kombinasi-kombinasi yang diperlukan (Budiono, 1982: 62)

H. UKM

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Usaha kecil menengah (UKM) merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaan perlu terus dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Usaha kecil menengah (UKM) adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlahpekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (asset) atau jumlahpekerjanya sesuai dengan defenisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. (Sukirno, 2004:365) Dalam konsep Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan UKM yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria:

1. Aset Rp Rp 50 milyar,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Omzet Rp 250 milyar.

Adapun yang menjadi karakteristik UKM menurut Mintzberg, Musselman dan Hughes, ciri-ciri umum usaha kecil adalah (Situmorang dkk., 2003: 15):

1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis
2. Struktur organisasinya bersifat sederhana
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan

5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memiliki
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
7. Kemampuan dasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas
8. Margin keuntungan sangat tipis
9. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu mempekerjakan manajer-manajer profesional. Hal itu menyebabkan kelemahan manajerial, yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi.

Sedangkan ciri-ciri usaha kecil di Indonesia menurut Sutojo (Bararualo, 2001:7):

1. Lebih dari setengah usaha kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan
2. Selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi usaha kecil bervariasi tergantung dengan tingkat perkembangan usaha.
3. Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan bank
4. Hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional
5. Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang kurang dari 60%
6. Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi dan kelemahan manajerial
7. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumen
8. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah sangat besar

Di dalam melaksanakan kegiatan usahanya, UKM menghadapi tantangan yang bersifat global dalam bentuk blok-blok perdagangan global serta perdagangan investasi lainnya. Selain tantangan tersebut, UKM juga menghadapi kendala seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah; tingkat produktivitas dan kualitas produk dan jasa

rendah; kurangnya teknologi dan informasi; faktor produksi, sarana dan prasarana belum memadai; aspek pendanaan dan pelayanan jasa pembiayaan; iklim usaha belum mendukung (seperti: Peraturan Perundangan Persaingan Sehat); dan koordinasi pembinaan belum berjalan baik. Namun demikian ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UKM dalam kegiatan usahanya, seperti: adanya komitmen pemerintah; pembangunan yang makin berkeadilan dan transparan; ketersediaan SDM yang berkualitas (Eks PHK); sumberdaya alam yang beraneka ragam; terpuruknya usaha-usaha yang dikelola pengusaha besar; apresiasi dolar Amerika Serikat yang sangat tinggi. Berdasarkan peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi UKM maka kita dapat menggunakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat (usahanya).

Teknologi yang ada saat ini seharusnya dapat digunakan atau dimanfaatkan pula oleh UKM guna meningkatkan produktivitas usahanya. Teknologi yang ada saat ini sangat beraneka ragam seperti teknologi industri dan teknologi informasi. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi produksi oleh UKM dapat kita lihat dari jenis peralatan atau alat-alat yang mereka pergunakan di dalam mengolah atau membuat produk (barang). Semakin baik alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang maka kegiatan produksi akan lebih efektif dan efisien sehingga para pengusaha dapat memenuhi permintaan dari konsumen atau masyarakat yang membutuhkan produk tersebut. Lain halnya dengan teknologi informasi, pada dasarnya teknologi ini memungkinkan dan mempermudah pengusaha agar dapat berhubungan dengan cepat, mudah dan terjangkau. Teknologi ini juga mendorong pemaknaan ulang perdagangan dan investasi, baik untuk usaha dalam skala yang besar, usaha kecil maupun usaha menengah. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu mereka di dalam memasarkan produk. Dengan demikian segala kegiatan baik produksi maupun distribusi akan menjadi lebih mudah.

Secara umum UKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun bidang/ jenis usaha yang terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah:

1. Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
2. Industri penyempurnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/ celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
3. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
4. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan:
5. Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arang, sabut.
6. Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
7. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
8. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
9. Industri barang dari tanah liat baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.

10. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
11. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.
12. Perdagangan dengan skala kecil dan informasi.

Adapun yang menjadi landasan hukum UKM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1985.
2. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No. 9 Tahun 1995.
3. Bentuk Badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.
4. Perizinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan tanda daftar industri.

Tata cara perizinan usaha perdagangan (SIUP) diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPP/Kep/99 tentang tata cara pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Terkait dengan itu, dalam usaha menemukan jawaban atas masalah-masalah, tujuan dan manfaat yang dirumuskan pada bab sebelumnya, maka harus menggunakan metode penelitian yang sesuai.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul ” Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang)” ini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Moleong (2010) merupakan penelitian yang berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Moleong (2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Fokus Penelitian

Masalah sering juga dikenal dengan fokus penelitian. Penetapan fokus penelitian dapat dipastikan apabila peneliti sudah berada di lapangan penelitian. Artinya meskipun rumusan masalah peneliti sudah cukup baik dan telah dirumuskan berdasarkan

penelaahan kepustakaan dan telah ditunjang dengan sejumlah pengalaman tertentu, namun bisa jadi situasi lapangan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai masalah yang telah difokuskan, (Mukhtar, 2013, h. 58). Dengan demikian dapat dipahami bawasanya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai data atau fenomena dilapangan yang terjadi ketika penelitian.

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menentukan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari kebijakan strategi dinas pertanian Kabupaten Malang untuk Kecamatan Pujon dalam mengembangkan produk unggulan daerahnya yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agrobisnis pertanian
 - a. Pembinaan pengolahan hasil alam dominan menjadi produk unggulan yang variatif, inovatif, dan unik.
 - b. Penyediaan wadah pemasaran untuk hasil olahan produk unggulan
 - c. Penyediaan wadah promosi untuk produk-produk unggulan yang siap jual.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agrobisnis pertanian
 - a. Faktor Pendukung:
 - 1) Kelembagaan yang kuat
 - 2) Tenaga kerja mudah didapat
 - 3) Ketersediaan sumber daya agroklimat yang potensial bagi perkembangan agrobisnis pertanian
 - b. Faktor Penghambat:

- 1) Keterampilan petani rendah
- 2) Keterbatasan modal usaha
- 3) Sarana transportasi yang sulit menjangkau area pertanian

C. Lokasi dan situs penelitian

Dengan demikian Lokasi yang untuk dipilih untuk melakukan penelitian adalah di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Malang Jl. Sumedang No. 28 Kepanjen Kabupaten Malang, yang bisa memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu juga penelitian dilakukan di sentra industri pertanian yang memproduksi produk-produk unggulan di Kecamatan Pujon yaitu di Kelompok Tani Harapan I Desa Madirejo.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi).

Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif).
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk membantu peneliti dalam menggali data dan informasi pada saat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang paling penting yaitu peneliti itu sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan data utama (Moleong, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti sendiri sebagai sarana untuk memperoleh informasi. Peneliti bertindak selaku instrument penelitian karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2010)

2. Pedoman Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah proses wawancara. Pedoman wawancara berisi serangkaian pertanyaan yang akan diajukan, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk dan mengarahkan peneliti dalam pencarian data.

3. Catatan Lapangan

Merupakan catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti saat melakukan pengamatan. Catatan ini sangat diperlukan karena tidak mungkin peneliti dapat mengingat secara keseluruhan tentang apa yang dilihat, dialami, dan didengar saat pengamatan. Catatan ini berguna untuk mencatat informasi yang diperoleh.

G. Metode Analisa Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana, karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. Dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dapat melalui alur kegiatan yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan, bisa terdiri dari wawancara, dokumentasi maupun obeservasi.

2. Kondensi Data

Kondensi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensi data dilakukan dengan cara

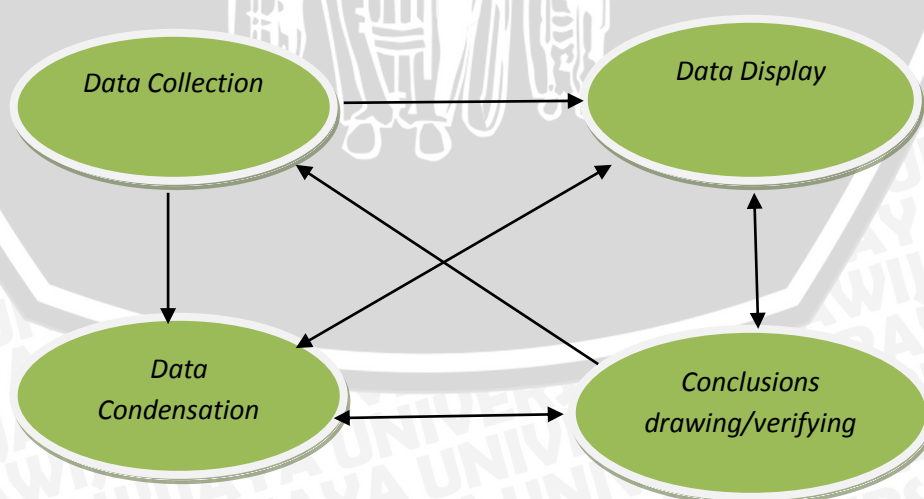
data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Kondensi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Dinas Pertanian Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Malang Jl. Sumedang No. 28 Kepanjen Kabupaten Malang, yang bisa memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dinas pertanian dan perkebunan kabupaten malang merupakan penggabungan dari dinas pertanian tanaman pangan dan dinas perkebunan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pada sektor pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah kabupaten malang dengan demografi terbagi menjadi 33 kecamatan terdiri dari 390 desa/kelurahan dengan luas wilayah 320.348 ha yang terdiri atas 49.732 ha sawah dan 270.616 ha lahan kering.

- a. Visi : Terwujudnya sistem agribisnis yang mandiri, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi untuk menuju pertanian berkelanjutan
- b. Misi :
 - 1) Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia secara optimal dan berkelanjutan
 - 2) Memperluas jangkauan pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi dan konsumsi
 - 3) Mengoptimalkan agribisnis untuk meningkatkan kemandirian masyarakat petani melalui penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha

- 4) Meningkatkan agribisnis tanaman perkebunan melalui penerapan "good agriculture practice" (gap) dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien
- 5) Meningkatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, sarana prasarana bagi masyarakat perkebunan
- 6) Meningkatkan peran swasta yang berpihak pada kepentingan petani
- 7) Mewujudkan sistem manajemen institusi yang kuat, dinamis dan berdaya saing

c. Tujuan

- 1) Memantapkan dan meningkatkan produksi pangan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, penyediaan bahan baku untuk mendukung industri pertanian/perkebunan
- 2) Mewujudkan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pertanian
- 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat petani melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil dan nilai tambah
- 4) Meningkatkan kemandirian petani melalui pemberdayaan kelembagaan pertanian dan perkebunan
- 5) Memantapkan dan mewujudkan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

d. Sasaran

- 1) Tercapainya peningkatan produksi padi, jagung, kedelai untuk mendukung kemandirian ketahanan pangan

- 2) Terwujudnya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas, mutu hasil dan nilai tambah
- 3) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat tani dalam berusaha tani
- 4) Terwujudnya pemantapan kawasan hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan
- 5) Terwujudnya masyarakat tani yang mandiri

e. Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian

- 1) Penguatan dan penumbuhan kelembagaan petani,
- 2) Penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian,
- 3) Penguatan basis data dan informasi pertanian,
- 4) Pengamanan ketersediaan pangan dan produksi melalui upaya-upaya untuk mengamankan lahan irigasi dan optimalisasi lahan,
- 5) Pelaksanaan diversifikasi konsumsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan meningkatkan mutu gizi,
- 6) Meningkatkan nilai tambah produk dan kualitas produk pertanian melalui peningkatan pengolahan hasil dan pengembangan agroindustri;
- 7) Peningkatan dukungan sektor lain untuk pembangunan pertanian, terutama peningkatan akses perkreditan untuk usahatani dan pengamanan ketersediaan sarana produksi pertanian.

f. Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pertanian dan perkebunan.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

g. Peran Sektor Pertanian

- 1) Pendukung penting Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
- 2) Penerimaan devisa melalui Ekspor,
- 3) Penyerapan Tenaga Kerja,
- 4) Penyediaan Pangan Nasional,
- 5) Penguatan Industri dan Peluang Investasi (Agroindustri, Agroinput)
dll.

h. Pemasalahan

- 1) Saat ini hampir seluruh masyarakat terutama di kabupaten malang bermakanan pokok beras;
- 2) Produksi /prduktifitas pertanian dan perkebunan masih rendah/makin rendah disebabkan makin menurunnya daya dukung lahan serta lambatnya inovasi teknologi budidaya dan produk rekaya genitika;
- 3) Nilai jual produk pertanian dari petani masih rendah, karena produk yang dijual masih berupa produk primer;
- 4) Mutu produk pertanian terutama dari petani masih rendah, sehingga posisi tawar baik di pasar lokal/internasional lemah;

- 5) Makin terbatasnya tenaga kerja dibidang pertanian (buruh tani) terutama di perkotaan /dekat perkotaan karena pekerja lebih memilih sektor industri;
- 6) Adanya serangan hama dan penyakit tidak bisa dideteksi /dipredeksi sehingga sering menyebabkan turunnya produksi yang cukup basar;
- 7) Benih berkualitas terutama sayuran cukup mahal, karena sebagian besar masih impor;
- 8) Basis data pertanian sebagai alat untuk pengambilan keputusan masih lemah , karena lahan sebagai obyek pengambilan data perimer belum terpetakan secara akurat;
- 9) Pelayanan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan belum optimal karena sarana, prasarana dan pembiayaan yang sangat terbatas.

2. Kecamatan Pujon

a. Keadaan Geografis dan Kependudukan Kecamatan Pujon

Kecamatan Pujon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang berjarak $\pm$ 30 Km arah barat ibukota kabupaten Malang, yang mempunyai kontur berbukit dengan ketinggian 1100 di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kecamatan Pujon 13.075,144 Ha. Terdiri dari 10 Desa 36 Dusun 85 RW dan 306 RT dengan batas-batas wilayah :Sebelah Utara Kabupaten Mojokerto, Timur Kota Batu, Selatan Kecamatan Wonosari dan Kab. Blitar, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngantang. Wilayah Kec. Pujon dikelilingi oleh gunung-gunung, antara lain: G. Banyak yang berbatasan dg. Kota Batu, G. Kawi, G.Cemoro Kandang,

G.Parangklakah, G.Dworowati, G.Argowayang, G.Gentong Growah, G.Biru, G.Anjasmoro.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani dan peternak yang terkenal dengan Koperasi Susu SAE nya. Tempat wisata yang terkenal adalah Wana Wisata Coban Rondo dan Pemandian Dewi sri. Selain itu terdapat tempat wisata yang tak kalah menariknya walaupun belum dikenal oleh kalayak, yakni Wisata Religi Watu Gilang di Desa Ngabab, Telaga Madiredo, Telaga Semedi, Coban Sriti di Desa Madiredo Termasuk Wisata Apel Darungan Desa Madiredo dan Coban Tretes di Desa Bendosari.

Kondisi Fisik Geografi Kecamatan Pujon memiliki wilayah, sebagai berikut :

- 1) Datar sampai berombak : 40 %
- 2) Berombak sampai berbukit : 30 %
- 3) Berbukit sampai bergunung : 30 %

Suhu minimum 18 °C dan suhu maksimum 20 °C serta memiliki rata-rata curah hujan 21.400 mm / tahun. Kondisi Demografis penduduk Kecamatan Pujon 64.594 jiwa, terdiri dari :

- 1) Laki – laki : 32.600 jiwa
- 2) Perempuan : 31.994 jiwa

Dengan perkembangan penduduk rata-rata 0,1 % pertahun dan kepadatan penduduk rata-rata 210 / Km² dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 18.569 KK.

Perekonomian di wilayah Kecamatan Pujon cukup stabil dengan penghasilan rata-rata masyarakat cukup tinggi dengan mata pencaharian penduduk terdiri dari :

- 1) Petani : 28.957 orang
- 2) Buruh tani : 7.894 orang
- 3) Pengusaha : 223 orang
- 4) Pengrajin : 820 orang
- 5) Buruh Bangunan : 373 orang
- 6) Buruh Pekebunan : 175 orang
- 7) Pedagang : 1.225 orang
- 8) Pegawai Negeri : 875 orang
- 9) ABRI : 623 orang
- 10) Peternak : 5.941 orang
- 11) Lain-lain : 7.488 orang

Kecamatan Pujon terdiri dari 10 desa dan 43 dusun/dukuh dan terperinci sebagai berikut :

Tabel 1: Daftar Desa dan Dusun Kecamatan Pujon

No.	Nama Desa	Jumlah			Luas Desa (Km ²)
		Dusun/ Duku	RT	RW	
1.	Bendosari	5	23	5	3,39
2.	Sukomulyo	5	45	11	20,91
3.	Pujonkidul	3	18	9	3,28

4.	Pandesari	5	48	7	27,23
5.	Pujonlor	3	27	10	8,3
6.	Ngroto	3	33	14	11,3
7.	Ngabab	4	27	7	15,25
8.	Tawang Sari	4	26	4	14,26
9.	Madiredo	7	39	11	14,54
10.	Wiyurejo	4	22	7	12,3
J U M L A H		43	308	85	130.76

Letak geografis dan bentuk wilayah sangat berpengaruh pada produktifitas tanah di wilayah Kecamatan Pujon yang menghasilkan hasil bumi (sayur mayur) yang sangat berpotensi dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanah Sawah : 910,10 Ha.
- 2) Tanah Tegalan : 2.276,00 Ha.
- 3) Tanah Perkebunan : 14,00 Ha.
- 4) Tanah Hutan : 21.671,00 Ha.
- 5) Lain-lain : 48,55 Ha.

Wilayah Kecamatan Pujon memiliki sarana transportasi darat dengan fasilitas jalan yang ada terdiri dari :

- 1) Jalan Propinsi : 13 Km.
- 2) Jalan Kabupaten : 35 Km.
- 3) Jalan Desa : 21 Km.

Kendaraan yang dipergunakan oleh masyarakat Kecamatan Pujon, antara lain : Truk, Bus, Colt, Ojek, kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sesuai dengan potensi wilayah Kecamatan Pujon, maka andalan perekonomian masyarakat Pujon adalah hasil pertanian (sayur mayur) didukung oleh peran serta Gapoktan dan klompok tani dan hasil peternakan yaitu susu sapi segar dengan rata-rata hasil 155 ton / 95.000 liter susu sapi per-hari yang tergabung dalam wadah koperasi, dalam hal ini Koperasi SAE yang bergerak di bidang persusuan dan KUD BAIK di bidang pertanian.

b. Potensi ukm

- 1) kerajinan kap lampu hias dari bambu dan rotan (desa bendosari)
- 2) cuka apel, tonik apel dengan produksi 1000 liter/bulan (desa madiredo)
- 3) kerajinan perak (desa pandesari)
- 4) yogurt susu sapi (desa ngabab)
- 5) susu pasterurisasi (desa pujon lor)
- 6) krupuk petolo (desa tawangsari)
- 7) pengrajin gitar (desa pandesari)

c. Potensi agro

- 1) wortel 250 ha, produksi 30 ton/ha (desa ngabab, desa tawangsari, desa sukomulyo, desa ngroto)
- 2) apel 295 ha produksi 30 ton /ha (desa madiredo, desa tawangsari, desa bendosari, desa wiyurejo, desa pujon lor)
- 3) kol bulat 150 ha produksi 30 ton/ha

d. Komoditas Unggulan Yang Lain

- 1) asparagus, gapoktan pujon lor , luas areal 5 ha, 1-2 kw/hari dikirim ke bali
- 2) Jamur tiram, kelompok tani jamur, luas areal 1,5ha dengan produksi 300 kg per hari dikirm ke jakarta, surabaya, dan bali
- 3) air susu sapi, 115 ton/hari, populasi sapi perah ± 27.000 ekor

e. Potensi wisata

- 1) Wisata Petik Apel (Desa Madiredo, Desa Tawang Sari, Desa Bendosari, Desa Wiyurejo)
- 2) Wisata Religi : Watu Gilang Di Desa Ngabab, Punden Mbah Ageng Ronggo Pramono Di Desa Ngroto
- 3) Air Terjun Dan Wana Wisata Coban Rondo Di Desa Pandesari
- 4) Air Terjun Coban Sewu Di Desa Bendosari
- 5) Air Terjun Coban Sriti Di Desa Madirejo (Belum Dikelola)
- 6) Pemandian Dewi Sri Di Desa Ngabab

f. Produk Unggulan

Di Kecamatan Pujon mempunyai banyak produk Unggulan, antara lain:

- 1) Carangmas Apel, Tonic Apel, Cuka Apel, Jenang Apel, Kerupuk Bawang dari Desa Madirejo
- 2) Yogurt Susu Sapi dari Desa Ngabab
- 3) Susu Pasteurisasi dari Desa Pujon Lor

B. Analisis Data

1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Daerah Pujon Berbasis Agribisnis Pertanian (Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto, MP)

a. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan.

Dengan adanya strategi perbenihan mendorong terciptanya varietas-varietas pertanian yang unggul dan berdaya saing tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri untuk tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta tanaman perkebunan. Industri perbenihan dan perbibitan swasta nasional merupakan salah satu industri hulu di sektor pertanian praproduksi, yang berperan sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian secara keseluruhan, termasuk industri pasca panen, seperti industri pangan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan industri perbenihan dan perbibitan swasta nasional adalah seluruh kegiatan dalam menghasilkan benih/bibit unggul baru berproduktivitas tinggi dan berkualitas tinggi dengan daya saing tinggi, memperbanyaknya, mengedarkannya dan memasarkannya, baik dalam satu kelembagaan usaha ataupun bagiannya, seperti: penangkar benih dan lain-lain, yang memanfaatkan potensi sumber daya hayati nasional secara bijak dan lestari. Membangun industri perbenihan dan perbibitan swasta nasional merupakan upaya mendasar dalam pembangunan sektor pertanian keseluruhan. Sebab benih dan bibit varietas unggul bermutu merupakan penentu batas atas produktivitas dan kualitas produk suatu usaha tani, baik itu usaha tani besar maupun usaha tani kecil. Membangun industri

perbenihan dan perbibitan swasta nasional merupakan landasan yang baik bagi proses produksi dan industri pangan dan industri lainnya yang berbasis produk pertanian.

Produk industri perbenihan dan perbibitan swasta nasional yang unggul dan berkualitas tinggi serta murah akan menjamin keuntungan dan memperkecil resiko bagi petani produsen, baik itu dari usaha tani kecil ataupun besar (komoditi pangan dan komoditi lainnya). Bagi petani tanaman pangan penggunaan benih/ bibit unggul yang spesifik wilayah dari produk industri benih, akan memberikan jaminan keuntungan bagi usaha taninya. Dengan demikian upaya tersebut meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani di desa-desa, serta membantu mengentaskan kemiskinan di desa-desa.

b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Agribisnis.

Dengan menerapkan strategi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan agribisnis. Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan pada wilayah perbatasan, pemekaran, penyangga, maupun kawasan ekonomi khusus (KEK) dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan dan Mendorong pengembangan aneka produk (*products development*) perkebunan serta upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah.

c. Penguatan Modal Usaha Kelompok.

Dalam pengelolaan usaha komoditi perkebunan rakyat khususnya di kelompok tani ditemui beberapa masalah di antaranya memperoleh modal usaha untuk proses budidaya, pengolahan maupun pemasaran. Pada umumnya pihak kelompok masih sulit memperoleh modal baik melalui kredit program maupun bersumber dari hasil usaha agribisnis kelompoknya, meskipun ada sebagian kecil yang telah berhasil melakukan pemupukan modal dari akumulasi hasil usahanya.

Kendala utama kelompok tani dalam mendapatkan modal usaha dari perbankan terbentur oleh agunan seperti kredit program revitalisasi perkebunan, sampai saat ini masih dirasakan sulit diperoleh bahkan jika agunan itu ada masih dihantui dengan ketentuan internal pihak bank dengan kehati-hatiannya dan kekhawatiran terhadap pihak debitur yang diprediksi tidak dapat mengembalikan kreditnya dengan cepat padahal agunan telah disiapkan, hal tersebut mengakibatkan program tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik meskipun setiap tahun pembinaan pelaksanaan program terus dilakukan.

Pemupukan modal usaha kelompok tani yang saat ini berlangsung di kelompok tani madiredo diserahkan kepada kesempatan minimal dua per tiga anggota atau kelompok tani untuk menetapkan besaran sisihan hasil usahanya untuk dijadikan pemupukan modal usaha, sehingga penguatan modal usaha itu tidak dipaksakan oleh pihak manapun.

Peran pemerintah sangat penting dan perlu terus dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dapat dilakukan dengan memadukan kegiatan tersebut dengan program lain yang ada di seputar lokasi areal

pengembangan komoditas perkebunan rakyat atau kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang terkait erat seperti peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Diharapkan dengan kerjasama itu pihak petani perkebunan rakyat dapat melakukan aktivitas usahanya dengan memperoleh modal yang memadai dari hasil usaha kelompok itu sendiri atau mengupayakan skim kredit program lain yang pro pekebun (rakyat) atau skim kredit yang telah ada dengan perubahan regulasi dengan tidak memberatkan pekebun supaya lebih berdaya dalam melakukan usahanya.

d. Fasilitasi Pengembangan Hortikultura Organik.

Dengan adanya arus globalisasi, tidak mungkin dihindari semakin lama produk hortikultura yang masuk ke Indonesia dari negara-negara lain akan semakin beragam jenisnya dan volumenya semakin banyak. Menghadapi realitas ini mau tidak mau produk hortikultura harus bersaing dengan produk dari negara lain. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut dengan tanpa mengesampingkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dikaji berbagai permasalahan yang ada sehingga upaya pencapaian tujuan di atas dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu penerapan sistem budidaya hortikultura yang lebih baik serta penggunaan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan, pertanian organik merupakan salah satu alternatif budidaya pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang bebas dari segala bentuk bahan inorganik seperti pupuk buatan, pestisida dan zat pengatur tumbuh. Teknologi yang saat ini diterapkan merupakan

teknologi yang berorientasi pada pencapaian target produksi dengan menggunakan masukan produksi yang semakin meningkat, seperti bibit unggul, pupuk buatan, pestisida dan zat pengatur tumbuh. Disamping hasil positif dengan peningkatan produksi, penggunaan masukan modern juga mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut : penggunaan pupuk buatan mendatangkan pencemaran pada air permukaan dan air tanah dengan adanya residu nitrat dan fosfat, dan tanah menjadi semakin berkurang kesuburannya karena penggunaan pupuk berlebihan, penggunaan varietas unggul yang monogenik dan seragam secara spesial dan temporal mengurangi keanekaragaman hayati, dan hilangnya berbagai jenis tanaman asli, penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan resistensi, resurgensi hama, timbulnya hama sekunder, terbunuhnya binatang bukan sasaran dan residu racun pada buah dan sayuran serta lingkungan. Selain itu kegiatan pertanian secara intensif juga berperan dalam proses pemanasan bumi atau efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon antara lain melalui emisi gas metan dan N_2O akibat penggunaan pupuk buatan.

e. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.

Arah pembangunan ke depan menuju pada industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini akan bisa diwujudkan dengan lebih dahulu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama masyarakat pertanian, sehingga kesinambungan dan ketangguhan petani dalam pembangunan pertanian bukan saja diukur dari kemampuan petani dalam

mengelola usahanya sendiri, tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya alam secara rasional dan efisien, berpengetahuan, terampil, cakap dalam membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia khususnya perubahan dalam pembangunan pertanian. Di sinilah pentingnya penyuluhan pertanian untuk membangun dan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Konsep pembangunan yang diterapkan, selalu menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM pertanian (petani, pengusaha, birokrat dan teknokrat pertanian), yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian, sebagai bagian integral pembangunan pertanian, merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Karenanya, kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif

Keberhasilan penyuluhan pertanian dapat dilihat dengan indikator banyaknya petani, nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian yang mampu mengelola dan menggerakkan usahanya secara mandiri, ketahanan pangan yang tangguh, tumbuhnya usaha pertanian skala rumah tangga sampai menengah berbasis komoditi unggulan di desa. Selanjutnya usaha tersebut diharapkan dapat berkembang mencapai skala ekonomis. Semua itu berkorelasi pada keberhasilan perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu akan bermuara pada peningkatan pendapatan daerah.

Sumber Daya Manusia pertanian (petani dan penyuluh) yang berkualitas adalah prasyarat mutlak keberhasilan pembangunan pertanian. Petani/pelaku agribisnis juga aparat penyuluh pertanian merupakan dua pilar pokok dalam pembangunan pertanian terutama pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Tinggi rendahnya kualitas SDM akan mempengaruhi efektifitas kegiatan penyuluhan .

Peran petani dalam kegiatan penyuluhan sangat penting diantaranya berpartisipasi dalam program penyuluhan, menjalankan latihan sampai mereka bisa menjalankan tugas baru, memberi saran, melengkapi program, berpartisipasi bersama-sama antara petani, wakil dan agen penyuluhan membuat proposal dan pembagian kerja sehingga masing-masing dapat bekerja secara maksimal.

f. Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani.

Untuk mendukung pemanfaatan lahan yang ada, pemerintah menyalurkan bantuan yang telah disalurkan sejak 2011 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang melalui berbagai program, salah satunya program peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi Petani/Kelompok tani di Kecamatan Pujon. Bentuk Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan budidaya tanaman Pangan dan hortikultura yang ditujukan untuk petani/kelompok tani Kecamatan Pujon dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, terutama Gapoktan dari keluarga kurang mampu. Peningkatan kesejahteraan petani yang menjadi sasaran utama

adalah masyarakat tani yang termasuk dalam kategori RTM (Rumah Tangga Miskin) yang berusaha disektor pertanian.

"Dengan adanya program dan kegiatan ini pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang yang dimulai sejak 2011 terbukti dapat menambah luas tanam dan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan oleh masyarakat tani yang ada di Kecamatan Pujon." Kata Ir. Tomie Herawanto, MP dalam wawancara pada tanggal 7 november 2015.

Bentuk kepedulian pemerintah seperti membantu gapoktan mengembangkan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, diharapkan gapoktan dari keluarga kurang mampu yang telah melaksanakan pengembangan budidaya tanaman dapat mempertahankan kelanjutan usaha setiap tahunnya. Dan diharapkan dapat meningkatkan luas tanam dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mewujudkan usahatani yang berwawasan agribisnis serta meningkatkan taraf hidup petani yang lebih baik.

- g. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis.

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan upaya meminimalisasi dampak negatif fenomena iklim, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas dalam mengelola dan menganalisis faktor-faktor iklim/cuaca seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan selanjutnya memanfaatkannya dalam kegiatan budidaya tanaman sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Demikian juga untuk pelaksanaan produksi tanam pangan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peningkatan kemampuan petugas

lapangan dan petani terhadap pemahaman kaidah pengendalian hama terpadu (PHT) perlu ditingkatkan.

Salah satu model peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas lapangan dan petani dalam mengelola dan menganalisis faktor iklim/cuaca dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah melalui magang sekolah lapangan (Magang sekolah lapangan iklim dan magang sekolah lapangan Pengendalian Hama terpadu) dapat dilakukan di LPHP (Lembaga Penelitian Hama Penyakit)/perguruan tinggi/Lembaga penelitian) Kesenjangan antara potensi hasil dengan aktual di lapangan masih relatif tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah tingkat penerapan teknologi yang belum optimal. Sehingga untuk mendorong produksi dan produktifitas perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui serangkaian pelatihan terhadap sumber daya manusia (Petugas lapang, kelompok tani dan petani), karena petugas dan petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan handal dapat menjadi pendorong dalam penerapan teknologi.

Oleh karena itu selain aspek PHT dan iklim, dalam rangka peningkatan produktifitas tananam pangan para petani juga dilatih melalui kegiatan sekolah lapangan PTT (SL-PTT) sehingga petani SL-PTT akan mampu mengambil keputusan dalam usaha taninya berdasarkan pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknologi secara benar dalam setiap tahapan budidaya usaha taninya.

h. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Agribisnis

Dengan memiliki berbagai sarana dan prasarana agribisnis yang memadai diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, sarana dan prasarana yang penting untuk dibangun dan dikembangkan dalam kegiatan agribisnis adalah antara lain:

- 1) Pasar, baik pasar untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, gudang tempat penyimpanan dan prosesing hasil pertanian sebelum dipasarkan.
- 2) Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal untuk kegiatan agribisnis.
- 3) Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis. Kelembagaan petani disamping sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan kelembagaan petani/petani maju dengan petani di sekitarnya merupakan Inti-Plasma dalam usaha agribisnis.
- 4) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi agribisnis, tempat percontohan usaha agribisnis, dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Terpadu dimana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan

pengembangan kawasan agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti kontak tani/petani maju, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

- 5) Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis, untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah kawasan agropolitan.
- 6) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian (agribisnis) yang efisien.
- 7) Transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.

i. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

Promosi adalah berbagai strategi yang kita lakukan untuk menginformasikan serta mempengaruhi target konsumen untuk akhirnya membeli produk kita. Promosi penting untuk dilakukan agar calon konsumen kita tertarik untuk melakukan pembelian produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Alasan penting pertama saat melakukan promosi adalah menciptakan *brand awareness*. Bahasa sederhana dari istilah ini adalah membuat produk kita dikenal oleh konsumen.

Menurut Ir. Tomie Herawanto, MP dalam wawancara 21 Desember 2015 “Simpelnya seperti ini: Bagaimana produk kita bisa terjual banyak jika konsumen saja tidak mengenal produk kita. Ini adalah alasan paling dasar dari sebuah strategi promosi yang kita lakukan.”

Promosi produk unggulan agrobisnis Kecamatan Pujon dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Malang melalui kegiatan agro expo pameran hasil olahan produk pertanian yang menjadi unggulan dan ciri khas Kecamatan Pujon, membuat website yang memuat informasi dan menjual produk-produk unggulan Kecamatan Pujon, maupun dengan mengadakan pameran UKM dan UMKM skala Kabupaten Malang sampai skala Provinsi

Jatim. Dengan tujuan mengenalkan produk unggulan dalam industri agribisnis di Kecamatan Pujon.

j. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Dalam Proses Produksi Agribisnis

Teknologi adalah pengetahuan yang digunakan untuk membuat barang, menyediakan jasa serta meningkatkan cara dalam menangani sumber daya yang penting dan terbatas. Pengertian lain tentang teknologi adalah upaya manusia untuk membuat kehidupan lebih sejahtera, lebih baik, lebih enak dan lebih mudah. Teknologi dikembangkan untuk membuat hidup lebih baik, efisien dan mudah. Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu suatu teknologi yang memenuhi, persyaratan:

- 1) Teknis, yaitu memperhatikan dan menjaga tata kelestarian lingkungan hidup, penggunaan secara maksimal bahan baku lokal, menjamin mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) produksi, secara teknis efektif dan efisien, mudah perawatan dan operasi, serta relatif aman dan mudah menyesuaikan terhadap perubahan.
- 2) Ekonomis, yaitu efektif menggunakan modal, keuntungan kembali kepada produsen, jenis usaha kooperatif yang mendorong timbul industri lokal.
- 3) Sosial budaya, memanfaatkan keterampilan yang sudah ada, menjamin perluasan lapangan kerja, menekan pergeseran tenaga kerja, menghindari konflik sosial budaya dan meningkatkan pendapatan yang merata.

Sebagaimana telah dikemukakan pengertian dan persyaratan Teknologi Tepat Guna dapat dikemukakan ciri-ciri yang cukup

menggambarkan Teknologi Tepat Guna (walaupun tidak berarti sebagai batasan) adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian, industri, pengubah energi, transportasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
- 2) Biaya investasi cukup rendah/relatif murah.
- 3) Teknis cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara dan didukung oleh keterampilan setempat.
- 4) Masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya.
- 5) Cara pendayagunaan sumber-sumber setempat termasuk sumber alam/energi/bahan secara lebih baik/optimal.
- 6) Alat mandiri masyarakat dan mengurangi ketergantungan kepada “pihak luar” (*self-reliance motivated*).

Menurut Ir. Tomie Herawanto, MP, dalam wawancara tanggal 21 Desember 2015, “Penggunaan Teknologi Tepat Guna dalam bidang pertanian menimbulkan suatu perubahan sosial bagi masyarakat petani, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat tani yang sekarang ini sangat tergantung pada Teknologi Tepat Guna seperti bibit/ benih unggul, pupuk, dan pestisida. Penggunaan Teknologi – Tekonologi Tepat Guna dirasa sangat memberi manfaat dan masih berpotensi untuk membantu masyarakat tani dalam meningkatkan produksi.”

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa masyarakat tani sudah mulai menerima sentuhan modernisasi, ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah

suatu sistem sosial dalam hal ini pihak yang dimaksudkan ialah para petugas penyuluh pertanian lapang, yang bertugas memberikan rekomendasi bagi peningkatan produktivitas kerja masyarakat tani, salah satunya dengan penggunaan Teknologi Tepat Guna.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Potensi Daerah Pujon Berbasis Agrobisnis Pertanian

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis. Disini sumberdaya manusia itu adalah petani dan pelaku kegiatan agribisnis di pujon, dan pegawai Dinas Pertanian yang berkaitan dengan program-program pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian. Jumlah petani di Pujon cukup banyak, lebih dari 50 % dari seluruh jumlah penduduk adalah bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Pujon dilihat dari segi pendidikan memang hanya sebatas lulusan SD atau SMP tetapi pengetahuannya sudah lebih baik tentang pertanian, agribisnis, dan teknologi-teknologi yang mengikutinya. Hal ini disebabkan mereka antusias dan senang belajar apabila Dinas Pertanian Kabupaten Malang mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis. Selain itu, petani di Pujon mempunyai kelompok-kelompok usaha tani yang kerjasama antar anggotanya sangat erat. Mereka biasa bertukar

informasi dan pengalaman dalam menjalankan kegiatan agribisnis ini. Sehingga mereka selalu *update* tentang perkembangan yang sedang terjadi di dunia agribisnis.

Selain sumberdaya manusia dilihat dari sisi pelaku langsung atau petani. Sumberdaya manusia yang berperan aktif disini juga adalah pegawai Dinas Pertanian yang menjalankan program-program pendukung agribisnis. Dari segi jumlah, sudah cukup memadai karena selain tidak perlu mendatangi petani perorangan, pegawai dinas cukup mendatangi kelompok tani yang sudah ada. Sehingga meminimalisir jumlah pegawai yang terjun ke lapangan, meminimalisir waktu dan tenaga. Dari segi pendidikan, semua pegawai yang diterjunkan ke lapangan untuk program agribisnis ini adalah orang-orang yang memiliki *basic* pendidikan yang berhubungan dengan pertanian dengan tingkat lulusan universitas, sehingga ketika menyampaikan informasi mereka lebih siap dan tanggap apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari petani. Dari segi kerjasama, selama ini kondisi kelompok pegawai yang diterjunkan ke lapangan tidak pernah terdapat keluhan-keluhan yang berhubungan dengan perpecahan tim, jadi tim ini solid dan sangat kekeluargaan. Target programnya pun selalu terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan

2) Dukungan Pemerintah Pusat

Adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Dengan demikian tugas dan fungsi

masing-masing perangkat Dinas Pertanian lebih terarah, sehingga bisa bekerja dengan optimal. Selain itu juga adanya dukungan kebijakan dan regulasi hukum bidang pertanian dari pemerintah yang menjamin kesejahteraan petani dan melindungi petani dari tindak kesewenang-wenangan pihak lain.

Pemerintah pusat juga memberi dukungan teknologi di bidang pertanian. Dibangun sarana prasarana produksi hasil pertanian menjadi produk unggulan yang memadai dan menerapkan teknologi tepat guna. Semua itu berasal dari bantuan pemerintah pusat, yang bertujuan agar petani sebagai pelaku langsung kegiatan agribisnis semakin dimudahkan dengan adanya penerapan teknologi tepat guna ini. Selain teknologi dalam proses produksi, teknologi dalam komunikasi juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Seperti pelatihan sistem informasi menggunakan jaringan internet yang bertujuan sebagai wadah promosi agar semakin luas dan tidak hanya area lokal saja. Sehingga area promosi dapat mencakup wilayah nasional bahkan manca negara.

3) Tersedianya Sumber Daya Potensial Dan Sumber Daya Alternatif Bagi Perkembangan Agribisnis Pertanian

Menurut Ir. Tomie Herawanto, MP pada wawancara tanggal 21 Desember 2015, di Kecamatan Pujon terdapat banyak sekali sumber daya alam yang potensial untuk mendukung kegiatan agribisnis, seperti lahan, air, dan agroklimat. Lahan pertanian di Pujon tingkat kesuburan tanahnya masih terjaga dengan baik sehingga cocok dijadikan lahan pertanian. Begitu pula dengan ketersediaan air,

kebutuhan air yang berperan penting dalam kegiatan pertanian masih bisa terpenuhi walaupun dalam musim kemarau sekalipun. Karena sungai langsung berasal dari mata air pegunungan dan saluran peririgasian di Pujon sudah tertata dengan baik.

Selain itu terdapat sumber daya lain yang sering disebut dengan sumber daya alternatif. Sumber daya ini mendukung gerakan agribisnis organik. Sumber daya itu adalah berupa pupuk yang berasal dari kotoran hewan dan sampah-sampah organik lainnya, yang kemudian sering disebut pupuk kompos. Kotoran hewan disini yang sering digunakan sebagai pupuk kompos adalah kotoran sapi dan kambing. Selain pertanian, masyarakat Pujon adalah mayoritas sebagai peternak. Spesifikasinya adalah peternak sapi perah, dimana selain menghasilkan susu, limbahnya pun bisa dimanfaatkan menjadi pupuk yang dapat membantu petani apabila musim tanam tiba. Sehingga petani tidak tergantung pada pupuk pabrikan atau pupuk kimia lainnya karena memiliki sumber daya pupuk alternatif sendiri.

4) Pasar Komoditas Pertanian Terbuka Luas

Pasar bebas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk agribisnis pertanian terutama yang berasal dari Indonesia. Namun demikian produk agribisnis pertanian dari dalam negeri ini masih sulit menembus luar negeri, diantaranya karena negara importir sering menghambat masuknya produk melalui kebijakan non tariff barrier. Bahkan menekan import buah import saja masih sering terkendala jumlah dan harga. Sebagai negara yang memiliki dua musim sebenarnya potensi Indonesia sebagai penghasil produk-

produk unggulan agribisnis pertanian hampir saja tidak memiliki pesaing. Artinya bahwa potensi Indonesia sungguh besar, yaitu memiliki kekayaan sumberdaya komoditas pertanian yang tinggi serta ketersediaan lahan pertanian yang lebih luas. Variasi topografi dan model demografi untuk menghasilkan produk yang bervariasi juga terbuka luas.

Manajemen pasca panen menjadi penentu kualitas dari produk agribisnis pertanian. Hasil produknya wajib memperhatikan ukuran, rasa dan corak sesuai selera pasar. Sebagai contoh, kegiatan seperti yang dilakukan pebisnis agribisnis pertanian di Thailand. Mereka melakukan dari mulai melakukan ekspor, memiliki kargo hingga perbankan. Karena itu, pelaku agribisnis di Indonesia harus menjadi koordinator pengembangan agribisnis itu sendiri. Tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah, dengan kata lain pelaku agribisnis harus kreatif dan inovatif. Karena itu sudah menjadi keharusan di era global seperti saat ini.

b. Faktor Penghambat

1) Kondisi Sarana dan Prasarana Kebun Dinas/UPTD masih terbatas

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah kebun percontohan Dinas/UPTD yang belum terpelihara secara optimal. Kurangnya pengelolaan kebun yang ada mengakibatkan daya dukung bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan keterbatasan anggaran untuk mengelola kebun. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan

prasarana kebun adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kebun percontohan dalam usaha pembelajaran bagi petani.

2) Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Kepemilikan Lahan

Rata-rata pemilikan lahan petani di pedesaan kurang dari 0,5 ha bahkan cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya pengurangan lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan dan penguatan status kepemilikan lahan.

3) Lemahnya Sistem Perbenihan dan Perbibitan

Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari : subsistem pengembangan varietas untuk pengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat, subsistem produksi dan distribusi benih, subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan serta subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Saat ini infrastruktur perbenihan sulit berkembangnya karena memerlukan

investasi yang cukup besar. Tidak banyak pihak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah sebagai pendorong kegiatan masyarakat juga kurang menunjukkan perhatian, untuk itu diperlukan upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan dalam hal ini peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

4) Investasi di Bidang Pertanian dan Perkebunan Masih Rendah

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan sedangkan masyarakat petani tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok diharapkan dapat menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

5) Lemahnya Posisi Tawar di Tingkat Petani serta rendahnya daya saing produk pertanian

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil, akses petani terhadap sumber

permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan beserta pembahasan sebelumnya, dari strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis, yaitu:
 - a. Strategi awal yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Malang dalam mengembangkan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian adalah dengan melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya antara lain memberikan bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, dan pelatihan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
 - b. Selain itu program pengembangan/pemberdayaan sumberdaya manusia serta pengamanan ketersediaan pangan dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan produksi dan pengamanan sarana irigasi.
 - c. Untuk mendukung kegiatan promosi, Dinas Pertanian Kabupaten Malang menyediakan jaringan pemasaran dan informasi pasar serta dengan prinsip 6 tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, cara, lokasi dan harga)
 - d. Sedangkan teknologi tepat guna diterapkan dalam upaya-upaya pengolahan hasil dan pengembangan agroindustri agar hasil yang diterima petani atau pelaku agrobisnis menjadi optimal. Dengan penerapan teknologi pada pasca panen, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku agrobisnis.

- e. Mewujudkan keberadaan organisasi yang mantap didukung ketersediaan sumberdaya pertanian dalam mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan sesuai dengan permintaan pasar.
 - f. Mengoptimalkan sumberdaya pertanian untuk menunjang keberhasilan program.
 - g. Mengoptimalkan sumberdaya alam melalui pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi.
 - h. Pemberdayaan kelembagaan agribisnis secara optimal dengan didukung kebijakan pemerintah untuk mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan
 - i. Penerapan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengkajian.
 - j. Meningkatkan profesionalisme pegawai dalam rangka pembangunan pertanian dan perkebunan.
2. Pada pelaksanaan strategi yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Malang dalam mengembangkan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM) petani yang sudah memadai, aktif, dan bisa mengikuti perkembangan era global agribisnis serta pegawai dinas yang berpendidikan, solid, dan handal dalam menangani program yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang, dukungan dari pemerintah pusat, tersedianya sumber daya alternatif, pasar komoditas pertanian yang terbuka luas dan memiliki peluang besar.

Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi sarana dan prasarana UPTD yang masih terbatas, lemahnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan pertanian oleh petani, lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan, rendahnya investasi di bidang pertanian dan perkebunan, lemahnya posisi tawar di tingkat petani, serta rendahnya daya saing produk pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang sudah cukup baik, namun masih ada kendala yang perlu diatasi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada penjelasan sebelumnya mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis pertanian (studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang) maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hal yang paling krusial yang harus diperhatikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang adalah masalah perbenihan. Dinas Pertanian Kabupaten Malang perlu merencanakan program pengadaan benih secara serius agar program tersebut segera dapat terealisasi. Sebaiknya area yang digunakan untuk pembibitan adalah di daerah Pujon itu sendiri. Sebab dengan begitu tanaman yang dibibitkan tersebut sudah beradaptasi dengan iklim dan tanah daerah Pujon. Dengan kata lain bantuan bibit bukanlah berasal dari luar daerah Pujon.
2. Yang kedua adalah tentang sarana dan prasarana yang harus diperhatikan Dinas Pertanian Kabupaten Pujon. Terutama sarana transportasi dan prasarana permodalan UMKM. Saat ini transportasi belum menjangkau menyeluruh daerah pertanian di Pujon. Masyarakat masih menggunakan kendaraan roda dua baik

yang bermotor maupun sepeda kayu untuk membawa hasil pertaniannya dari lahan pertanian ke tempat pengolahan produk pertanian tersebut. Sarana yang perlu dibangun adalah pelebaran jalan dan pengaspalan jalan yang dilalui kendaraan-kendaraan pendukung kegiatan agribisnis. Selain itu bantuan modal juga sangat diperlukan masyarakat Pujon. Terutama modal yang digunakan untuk membeli alat transportasi roda empat seperti pick up ataupun truck. Sebab masyarakat Pujon masih kesulitan mengambil kredit untuk kendaraan-kendaraan tersebut, padahal mereka membutuhkannya. Hal ini disebabkan sarana perbankan di Pujon masih terbatas dan tidak menjangkau wilayah dalam, sehingga petani sebagai pelaku langsung kegiatan agribisnis yang notabene tempat tinggalnya di pelosok Pujon jadi kesulitan memperoleh modal usaha. Sebaiknya Dinas Pertanian Kabupaten Malang bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membangun koperasi maupun bank kecil yang dapat memberi bantuan modal kepada petani-petani di pelosok Pujon. Sehingga kegiatan agribisnis mereka menjadi semakin lancar dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Rahayu. 2008. Strategi Pemasaran Model Untuk Keunggulan. Bandung: Rizqi Press.
- Alisjahbana, Arnida S. 2012. Perencanaan Daerah Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?. Jakarta: Salemba Empat
- Ameriana, M., Basuki, R.S., Suryaningsih, E. dan Adiyoga, W. (2000). "Kepedulian Konsumen Terhadap Sayuran Bebas Residu Pestisida (Kasus Pada Sayuran Tomat dan Kubis)". Jurnal Hortikultura. 9, (4), 366-377
- Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta.
- Austin, J.E. 1992. Agroindustrial Project Analysis. London The John Hopkins. University Press.
- Badan Agribisnis. 1995. Sistem, Strategi dan Program Pengembangan Agribisnis Departemen Pertanian. Jakarta.
- Bambang Riyanto. 1994. Dasar-Datar Pembelanjaan Perusahaan, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Blakely. 1990. Planning Local Economic Development: Theory and Practice. New Delhi: Sage Publications.
- Boediono. 1982. "Ekonomi Mikro" Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 1. Yogyakarta: BPFE.
- David, Fred R., 2001, Manajemen Strategis: Konsep-konsep, Edisi Kesembilan, Penerjemah Kresno Saroso, 2001, Penerbit PT Indeks, Jakarta.
- Djoyohadikusumo, 1994, Perkembangan Pemikiran. Ekonomi, Cetakan Pertama, Penerbit Pt. Pustaka. LP3ES, Jakarta.
- Dumairy, 1998, Perekonomian Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Erlangga,. Jakarta.
- Freddy Rangkuti, 2004, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta
- Hasyim, H dan W.A. Zakaria. 1995. Pengembangan Agribisnis di Provinsi Lampung dalam Era Pasca GATT. Jurnal Sosial Ekonomika Vol. 1 No. 1 Juni 1995. Bandar Lampung. Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

- Husein Umar. 2001. Metode Penelitian Dan Aplikasi Dalam Pemasaran. Jakarta
- Mawardi, I. 1997. Daya Saing Indonesia Timur Indonesia Dan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial. Jakarta.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publication Inc.
- M.IrfanIslamy. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta :Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Mulyadi, 1990, Akuntansi Biaya Untuk Manajemen, Edisi Keempat Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Mustopadidjaja. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Prof. DR. Sugiono, 2013, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung
- Richard L. Daft, 2010, Era Baru Manajemen, Edward Tanujaya, Edisi 9, Salemba Empat
- Riduwan, Drs. M.BA 2013, Dasar-Dasar Statistika, Alfabeta. Bandung
- Robert G. Dyson (1990). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. In Elsevier-European Journal of Operational Research
- Saleh, Irsan Azhary. 1986. Industri Kecil. Jakarta: LP3ES.
- Saragih, Bungaran. 2001. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Yayasan Mulia Pesada. Bogor
- Sugiyono, 2013, Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung
- Siagian, Sondang. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Soekartawi. 2001. Analisis Usaha Tani.Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekartawi, 1994, Teori Ekonomi Produksi, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarsono. 1983. Pengantar Ekonomi Mikro. PT. New Aqua Press : Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 1997. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa : Drs. Haris Munandar, M. A., Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Tulus Tambunan, 1999, Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, 1999. Refleksi Pertanian dan. Hortikultura Nusantara, Pustaka Harapan, Jakarta.

Yuniarsih, Tjutju, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Alfabeta, 2008



LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Eka Novalia Panjarwanto
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 3 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perumnas Karang Duren Permai KDP 37-39 Pakisaji Malang
Email : ekanovalia3@yahoo.com

DATA PENDIDIKAN

1. SDN Karang Duren 03 (1997-2003)
2. SMP Sriwedari (2004-2007)
3. SMA Shalahuddin (2007-2010)
4. Universitas Brawijaya Malang (2010-2016)

Pedoman wawancara

1. Apa potensi daerah yang bisa dikembangkan di Kecamatan Pujon?

- a. Potensi ukm: kerajinan kap lampu hias dari bambu dan rotan (desa bendosari), cuka apel, tonik apel dengan produksi 1000 liter/bulan (desa madiredo), kerajinan perak (desa pandesari), yogurt susu sapi (desa ngabab), susu pasterurisasi (desa pujon lor), krupuk petolo (desa tawangsari), dan pengrajin gitar (desa pandesari)
- b. Potensi agro: wortel 250 ha, produksi 30 ton/ha (desa ngabab, desa tawangsari, desa sukomulyo, desa ngroto), apel 295 ha produksi 30 ton /ha (desa madiredo, desa tawangsari, desa bendosari, desa wiyurejo, desa pujon lor), dan kol bulat 150 ha produksi 30 ton/ha
- c. Potensi Komoditas Unggulan Yang Lain: asparagus, gapoktan pujon lor , luas areal 5 ha, 1-2 kw/hari dikirim ke bali, Jamur tiram, kelompok tani jamur, luas areal 1,5ha dengan produksi 300 kg per hari dikirm ke jakarta, surabaya, dan bali, air susu sapi, 115 ton/hari, populasi sapi perah ± 27.000 ekor
- d. Potensi wisata: Wisata Petik Apel (Desa Madiredo, Desa Tawangsari, Desa Bendosari, Desa Wiyurejo), Wisata Religi Watu Gilang Di Desa Ngabab, Punden Mbah Ageng Ronggo Pramono Di Desa Ngroto, Air Terjun Dan Wana Wisata Coban Rondo Di Desa Pandesari, Air Terjun Coban Sewu Di Desa Bendosari, Air Terjun Coban Sriti Di Desa Madirejo (Belum Dikelola), dan Pemandian Dewi Sri Di Desa Ngabab

2. Bagaimana kondisi kegiatan agribisnis di Pujon?

Pertanian dan perkebunan di kecamatan Pujon sangatlah berpotensi dalam hal mengangkat perekonomian bagi sebagian masyarakat kecamatan pujon, karena kondisi tanah yang subur dan mudah pengolahannya juga di dukung dengan jumlah sungai yang tanpa henti mengalir karena banyaknya sumber/mata air membuat

aktivitas pertanian dan perkebunan di kecamatan Pujon sangat diminati oleh sebagian masyarakat kecamatan Pujon yang sebagian besar memang berprofesi sebagai petani dan peternak.

Berbagai macam sayuran dan beberapa jenis buah-buahan yang berkualitas tinggi selalu dihasilkan dari pertanian dan perkebunan di kecamatan Pujon, karena keseluruhan para petani di kecamatan pujon cukup banyak pelajaran dan ilmu dari mulai pengolahan tanah yang praktis dan efisien sampai cara perawatan tanaman selama proses tanam sampai masa panen, juga penggunaan bahan insektisida dan bahan kimia yang ramah lingkungan untuk menanggulangi berbagai macam hama dan antisipasi keadaan cuaca yang tidak baik untuk tanaman sayur dan buah-buahan.

Untuk mengatur dan mengendalikan pertanian dan perkebunan di kecamatan Pujon di dirikanlah pusat agrobisnis di kecamatan pujon yang sifatnya memberikan informasi kepada para petani di kecamatan Pujon tentang musim tanam dari berbagai tempat di daerah lain selain kecamatan pujon yang sangatlah mempengaruhi harga panen sayur dan buah-buahan milik para petani di daerah kecamatan Pujon, sehingga para petani di kecamatan pujon bisa menyesuaikan tanaman apa yang lebih baik untuk mereka tanam agar para petani tersebut tidak mengalami kemerosotan harga sayur dan buah-buahan, informasi harga sayur dan buah-buahan di tempat agribisnis di kecamatan Pujon ini selalu berubah-ubah, karena juga menyesuaikan kebutuhan akan sayur dan buah-buahan dari daerah lain dan kebutuhan di daerah kecamatan Pujon itu sendiri, di samping memberikan informasi dari harga dan musim tanam dari daerah lain, pusat agribisnis ini sendiri juga menyediakan tempat untuk bertransaksi jual atau beli sayur dan buah-buahan bagi para tengkulak, baik untuk sayur dan buah-buahan yang akan di kirim ke daerah lain atau sayur yang akan atau sudah di datangkan ke kecamatan pujon.

3. Strategi apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan potensi daerah pujon berbasis agribisnis?
 - a. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan.
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Agribisnis.
 - c. Penguatan Modal Usaha Kelompok.
 - d. Fasilitasi Pengembangan Hortikultura Organik.
 - e. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
 - f. Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani.
 - g. Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis.
 - h. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Agribisnis
 - i. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.
 - j. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Dalam Proses Produksi Agribisnis
4. Bagaimanakah kondisi SDM dan upaya pengembangannya?

Jumlah petani di Pujon cukup banyak, lebih dari 50 % dari seluruh jumlah penduduk adalah bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Pujon dilihat dari segi pendidikan memang hanya sebatas lulusan SD atau SMP tetapi pengetahuannya sudah lebih baik tentang pertanian, agribisnis, dan teknologi-teknologi yang mengikutinya. Hal ini disebabkan mereka antusias dan senang belajar apabila Dinas Pertanian Kabupaten Malang mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis. Selain itu, petani di Pujon mempunyai kelompok-kelompok usaha tani yang kerjasama antar anggotanya sangat erat. Mereka biasa bertukar informasi dan pengalaman dalam menjalankan kegiatan agribisnis ini.

Sumberdaya manusia yang berperan aktif disini juga adalah pegawai Dinas Pertanian yang menjalankan program-program pendukung agribisnis. Dari segi jumlah, sudah cukup memadai karena selain tidak perlu mendatangi petani perorangan, pegawai dinas cukup mendatangi kelompok tani yang sudah ada. Sehingga meminimalisir jumlah pegawai yang terjun ke lapangan, meminimalisir waktu dan tenaga. Dari segi pendidikan, semua pegawai yang diterjunkan ke lapangan untuk program agribisnis ini adalah orang-orang yang memiliki *basic* pendidikan yang berhubungan dengan pertanian dengan tingkat lulusan universitas, sehingga ketika menyampaikan informasi mereka lebih siap dan tanggap apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari petani. Dari segi kerjasama, selama ini kondisi kelompok pegawai yang diterjunkan ke lapangan tidak pernah terdapat keluhan-keluhan yang berhubungan dengan perpecahan tim, jadi tim ini solid dan sangat kekeluargaan. Target programnya pun selalu terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan

Agar kualitas SDM baik petani maupun pegawai Dinas Pertanian tetap bagus maka pemerintah selalu melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis

5. Bagaimana dukungan sarana dan prasarana yang disediakan?

Pada dasarnya sarana dan prasarana untuk kegiatan agribisnis di Pujon sudah cukup baik. Sudah terdapat Pasar, baik pasar untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, gudang tempat penyimpanan dan prosesing hasil pertanian sebelum dipasarkan.

Pujon juga mempunyai balai percobaan/pengkajian teknologi agribisnis, untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah kawasan agropolitan. Selain itu jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian (agribisnis) yang

efektif. Akan tetapi sarana transportasi juga masih butuh banyak perhatian, sebab hanya daerah Pujon terluar yang terjangkau alat transportasi besar seperti truk, sehingga pembangunan jalan yang melalui area Pujon bagian dalam/pelosok perlu dilakukan.

Dan itu sudah masuk dalam agenda program Dinas Pertanian Kabupaten Malang

6. Bagaimana kondisi kelembagaan dan pegawai pelaksana program yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang?

Kelembagaan milik Dinas Pertanian Kabupaten Malang sudah cukup baik. Antara lain terdapat Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal untuk kegiatan agribisnis. Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis. Kelembagaan petani disamping sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan kelembagaan petani/petani maju dengan petani di sekitarnya merupakan Inti-Plasma dalam usaha agribisnis. Selain itu Pujon juga memiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi agribisnis, tempat percontohan usaha agribisnis, dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Terpadu dimana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti kontak tani/petani maju, tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Namun ada beberapa UPTD yang perlu perbaikan dan pengoptimalan fungsi. Yaitu UPTD yang bergerak dibidang permodalan UMKM.

7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut?

Faktor pendukung tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM) petani yang sudah memadai, aktif, dan bisa mengikuti perkembangan era global agribisnis serta pegawai dinas yang berpendidikan, solid, dan handal dalam menangani program yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang, dukungan dari pemerintah pusat, tersedianya sumber daya alternatif, pasar komoditas pertanian yang terbuka luas dan memiliki peluang besar.

Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi sarana dan prasarana UPTD yang masih terbatas, lemahnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan pertanian oleh petani, lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan, rendahnya investasidi bidang pertanian dan perkebunan, lemahnya posisi tawar di tingkat petani, serta rendahnya daya saing produk pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang sudah cukup baik, namun masih ada kendala yang perlu diatasi.

8. Program-program apa saja yang telah dijalankan untuk mendukung penerapan strategi pengembangan potensi daerah Pujon berbasis agribisnis?
 - a. Program pengembangan perbenihan atau perbibitan
 - b. Pengembangan/pemberdayaan sumberdaya manusia
 - c. Program mendukung kegiatan promosi.
 - d. Menerapkan teknologi tepat guna dalam proses produksi kegiatan agribisnis
 - e. Mewujudkan keberadaan organisasi yang mantap
 - f. Mengoptimalkan sumberdaya pertanian untuk menunjang keberhasilan program.
 - g. Mengoptimalkan sumberdaya alam melalui pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi.
 - h. Pemberdayaan kelembagaan agribisnis

- i. Penerapan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengkajian.
- j. Meningkatkan profesionalisme pegawai dalam rangka pembangunan pertanian dan perkebunan.

